Katalog: 4102004.3571

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA KEDIRI 2022

https://kediri kota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KEDIRI

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA KEDIRI 2022

https://kediritkota.bps.go.id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA KEDIRI 2022

ISBN:
No. Publikasi: 35710.2210
Katalog: 4102004.3571

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman: xvi + 111 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Ilustrasi Kover:
-

Diterbitkan oleh:
© BPS Kota Kediri

Dicetak oleh:
-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://kediri kota.bps.go.id

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Lilik Wibawati, SE
Koordinator Teknis	: Dra. Dyah Retnani Pariningtyas, M.Si.
Pengolah Data	: Listiana, SST
Penulis	: Listiana, SST
Tata letak	: Listiana, SST
Gambar Kulit	: Nur Ulum Rahmanulloh, S.Tr.Stat
Penyunting	: Dra. Dyah Retnani Pariningtyas, M.Si.

https://kediriskota.bps.go.id

https://kediriKota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Kediri yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional dan Sensus Penduduk yang telah diolah ataupun dirilis dalam publikasi lain, serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri 2022 diharapkan mampu menjembatani antara penyedia dan pengguna data.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

https://kediri kota.bps.go.id

Kediri, Desember 2022

Kepala BPS Kota Kediri

Lilik Wibawati

https://kediriKota.bps.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar xiii
Daftar Lampiran xv

1. Kependudukan 1
   1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin 2
   1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk 5
   1.3 Angka Beban Ketergantungan 7
   1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama 9
   1.5 Penggunaan Alat/Cara KB 12
   1.6 Kepemilikan Akte Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan 13

2. Kesehatan 17
   2.1 Angka Harapan Hidup 18
   2.2 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk 19
   2.3 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 22

3. Pendidikan 29
   3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah 30
   3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 32
   3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 34
   3.4 Angka Melek Huruf 35
   3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan 37

4. Ketenagakerjaan 41
   4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 42
   4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 44

https://kediri kota.bps.go.id

Halaman

5. Taraf dan Pola Konsumsi 47
   5.1 Pengeluaran Rumah Tangga 47

6. Perumahan dan Lingkungan 53
   6.1 Kualitas Rumah Tinggal 54
   6.2 Fasilitas Rumah Tinggal 55
   6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal 57

7. Kemiskinan 59
   7.1 Perkembangan Penduduk Miskin 60
   7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 62
   7.3 Karakteristik Penduduk Miskin 65

8. Sosial Lainnya 69
   8.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan 69
   8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset 70
   8.3 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi 71
   8.4 Kepemilikan Jaminan Kesehatan 75
   8.5 Aktivitas Merokok Tembakau 78
   8.6 Akses Kredit Usaha 81

Lampiran 83

https://kediriKota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2014-2021 2

1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 6

1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Kediri, 2014-2021 8

1.4 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama di Kota Kediri, 2019-2021 10

1.5 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri, 2019-2021 11

1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kota Kediri, 2020-2021 13

1.7 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Kediri, 2018-2021 14

1.8 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Kota Kediri, 2018-2021 15

2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dan Angka Kesakitan Di Kota Kediri, 2020–2021 21

2.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021 22

2.3 Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021 23

2.4 Persentase Penduduk Menurut Tempat Berobat Jalan yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021 24

https://kedirikotabps.go.id

Halaman

2.5 Persentase Penduduk Menurut Tempat Rawat Inap Setahun yang Lalu di Kota Kediri, 2020-2021 25

2.6 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak pada Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran di Kota Kediri, 2020-2021 26

2.7 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Sebelum Dua Tahun yang Lalu Menurut Tempat Bersalin Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021 27

3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Kediri, 2021 33

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Se-Eks Karesidenan Kediri (Tahun), 2020-2021 34

3.3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Se-Eks Karesidenan Kediri (Persen), 2021 36

3.4 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2016-2020 38

4.1 Penduduk Kota Kediri Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2020-2021 43

5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kediri, 2019-2021 48

5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Makanan di Kota Kediri (Rupiah), 2019-2021 49

5.3 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Non Makanan di Kota Kediri (Rupiah), 2019-2021 51

6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Kediri, 2019-2021 55

6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Kediri, 2019 - 2021 56

https://kedirikota.bps.go.id

Halaman

6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Perumahan di Kota Kediri, 2018 - 2020 57

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Kediri, 2016 - 2020 60

7.2 Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan di Kota Kediri dan Jawa Timur, 2016 - 2020 63

7.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Kediri, 2018 - 2020 65

7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kota Kediri, 2018 - 2020 67

7.5 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kota Kediri, 2018 - 2020 68

8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Kediri, 2018 - 2020 70

8.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2020 77

8.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Aktivitas Merokok Tembakau dan Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2020 78

https://kedirikota.bps.go.id

https://kediriKota.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri, 2014-2021 3
1.2 Rasio Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2014 - 2021 4
1.3 Kepadatan Penduduk Kota Kediri (Jiwa/ Km^2), 2017 - 2021 5
1.4 Angka Beban Ketergantungan Kota Kediri, 2017 - 2021 7
2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Kediri dan Jawa Timur (Tahun), 2017 – 2021 19
2.2 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021 20
3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri (Persen), 2021 31
3.2 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2017 -2021 38
4.1 Angkatan Kerja Kota Kediri, 2017-2021 42
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Kediri (Persen), 2017-2021 45
7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri dan Jawa Timur, 2017-2021 61
7.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Kediri, 2019 - 2021 66
8.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Kediri, 2021 69
8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Teknologi Infomasi dan Komunikasi di Kota Kediri, 2020-2021 72
8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2021 73
8.4 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Mengakses Internet di Kota Kediri, 2021 74
8.5 Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kota Kediri, 2021 76
8.6 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap oleh Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri, 2021 79
8.7 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Kediri, 2021 81

https://kediri-kota.bps.go.id

https://kediriKota.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri (Jiwa), 2019-2021 85

Lampiran 2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri (Ribu Jiwa), 2019-2021 86

Lampiran 3. Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019-2021 87

Lampiran 4. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019-2021 88

Lampiran 5. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 89

Lampiran 6. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 90

Lampiran 7. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019 -2021 .. 91

Lampiran 8. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 92

Lampiran 9. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 93

Lampiran 10. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 94

Lampiran 11. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 95

Lampiran 12 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 96

Lampiran 13. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 97

https://kedirikota.bps.go.id

Halaman

Lampiran 14. P0, P1, dan P2 Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 98
Lampiran 15. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 99
Lampiran 16. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 100
Lampiran 17. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 101
Lampiran 18. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 102
Lampiran 19. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 103
Lampiran 20. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 104
Lampiran 21. Persentase Penduduk Usia Lima Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021 105
Lampiran 22. Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 106
Lampiran 23. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020 -2021 107
Lampiran 24. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 108
Lampiran 25. Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap oleh Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri, 2021 109
Lampiran 26. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Aktifitas Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021 110
Lampiran 27. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Kediri, 2021 111

https://kediriskota.bps.go.id

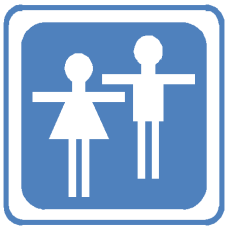

1. KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan penduduk harus dididik, dibina, dan dikembangkan, sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sementara sebagai objek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dengan demikian, pembangunan harus memperhitungkan kemampuan penduduk sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan.

Penduduk dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini mungkin terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang layak.

https://kediriskota.bps.go.id

Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus

dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diitingkatkan.

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan data BPS dalam Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2021 mencapai 287.962 jiwa. Kondisi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.166 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang mencapai 286.796 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tujuh tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Kediri mengalami penambahan sekitar 3,56 persen dari jumlah penduduk tahun 2014 yang telah mencapai 278.072 jiwa. Dengan kata lain, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir jumlah penduduk Kota Kediri telah mengalami pertambahan penduduk sebanyak 9.890 jiwa.

https://kediritakota.bps.go.id

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2014-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014[1]	278 072	0,53	99,34
2015[1]	280 004	0,69	99,28
2016[1]	281 978	0,70	99,31
2017[1]	284 003	0,72	99,45
2018[1]	285 582	0,56	99,30
2019[1]	287 409	0,64	99,47
2020[2]	286 796	-0,21	100,30
2021[3]	287 962	0,90	100,26

Sumber : [1]BPS-Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020
[2]BPS-Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)
[3]BPS-Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini mengukur seberapa cepat populasi mengalami perubahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah, selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi. Berdasarkan data BPS dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2014 hingga 2019 berturut-turut sebesar 0,53 persen, 0,69 persen, 0,70 persen 0,72 persen, 0,56 persen, dan 0,64 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2020 sebesar -0,21 persen (berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 September) dan tahun 2021 mencapai 0,90 persen (berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020 -2023) . Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri masih berada di bawah 1 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kediri secara relatif berhasil melakukan pengendalian dalam hal pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri, 2014-2021

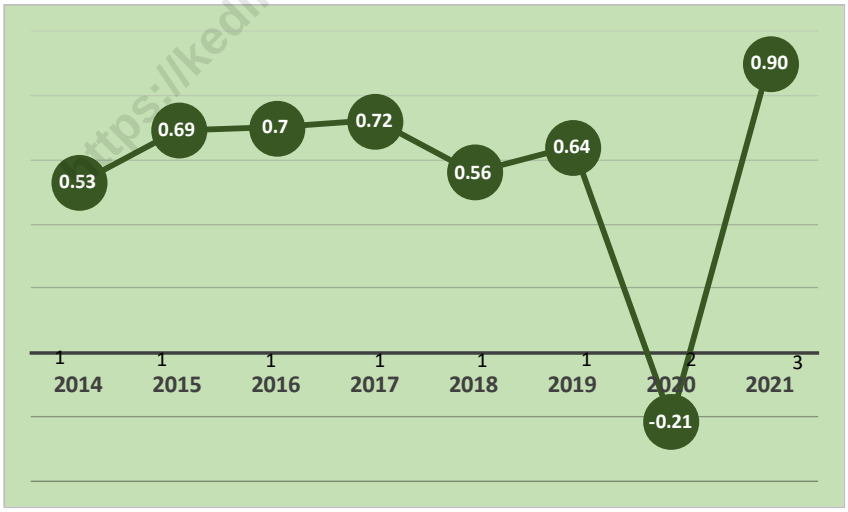

Sumber : [1]BPS-Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020
[2]BPS-Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)
[3]BPS-Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Deskripsi penduduk secara lebih khusus dapat diamati dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menurunkan salah satu indikator penting

demografi yaitu Rasio Jenis Kelamin. Rasio Jenis Kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 wanita. Data mengenai Rasio Jenis Kelamin bermanfaat untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender terutama terkait dengan perimbangan pembangunan laki – laki dan perempuan secara adil.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Kediri pada tahun 2021 sebesar 100,26 Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kota Kediri sama banyaknya dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka rasio jenis kelamin pada tahun 2014-2019 selalu berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2014-2019, jumlah penduduk perempuan di Kota Kediri selalu lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 naik di atas 100.

https://kediriKota.bps.go.id

1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Gambar 1.2 Rasio Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2014-2021

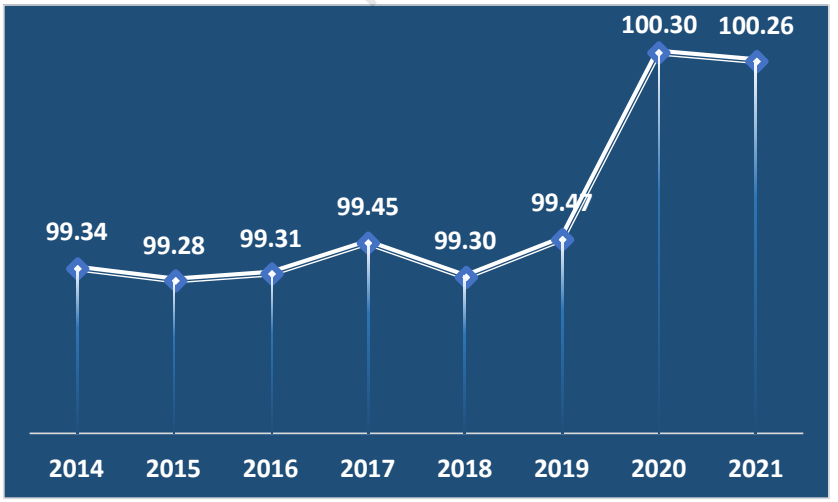

Sumber : BPS Kota Kediri

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh berbagai daerah yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk di Kota Kediri (Jiwa/ Km²), 2017-2021

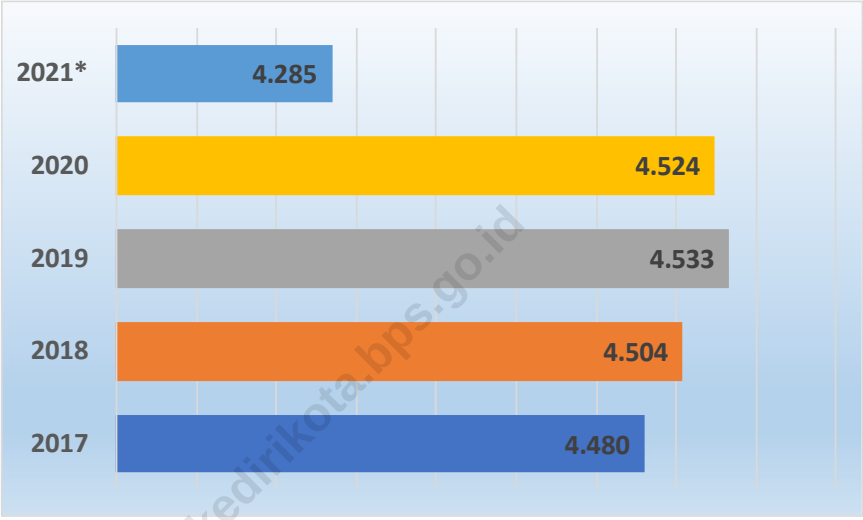

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS Kota Kediri

*Catatan : * Luas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017*

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Kediri sekitar 4.448 jiwa per km^2, selanjutnya pada tahun 2017 sekitar 4.480 jiwa per km^2, tahun 2018

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kab/Kota/ Prov	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	40 879	47 799,75	855
Trenggalek	735	1 147,22	641
Tulungagung	1 097	1 055,65	1 039
Blitar	1 231	1 336,48	921
Kediri	1 644	1 386,05	1 186
Nganjuk	1 110	1 224,25	906
Kota Kediri[1]	288	67,20	4 285
Kota Blitar	150	32,57	4 617

Sumber : BPS-Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Catatan : [1] Luas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

https://kediri.bps.go.id

sekitar 4.504 jiwa per km^2, tahun 2019 sekitar 4.533 jiwa per km^2., dan tahun 2020 mencapai 4.558 jiwa per km^2 . Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 4.285 jiwa per km^2*.

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di wilayah Eks Karesidenan Kediri, Kota Kediri adalah kota yang paling padat kedua di bawah Kota Blitar, walaupun secara jumlah penduduk sebenarnya hanya menduduki peringkat keenam se-Eks Karesidenan Kediri. Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah Kota Kediri yang cukup sempit.

Catatan:

** Luas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017*

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Gambar 1.4
Angka Beban Ketergantungan Kota Kediri, 2017 - 2021

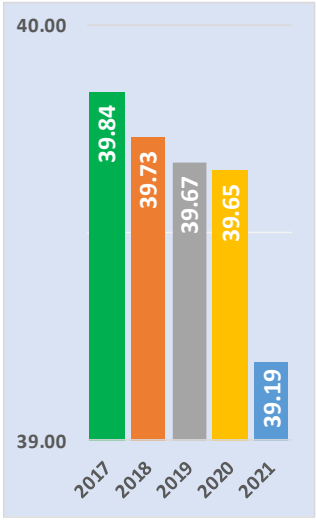

Sumber: BPS - Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa TImur 2010-2020 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

menurunkan salah satu indikator penting demografi lainnya yaitu Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*). Rasio Ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk bukan angkatan kerja (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi nilai persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.

Dapat dikatakan bahwa semakin menurunnya rasio ketergantungan merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan kependudukan suatu wilayah. Semakin kecil rasio ketergantungan di suatu wilayah maka semakin sedikit beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia yang belum dan tidak produktif lagi. Kondisi tersebut akan meningkatkan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Semakin besar peluang penduduk untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya, semakin besar peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

https://kediriKota.bps.go.id

Selama periode 2017-2021 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung menurun. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 angka beban ketergantungan Kota Kediri berturut-turut sebesar 39,84 persen, 39,73 persen, 39,67 persen, 39,65 persen, dan 39,19 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung sekitar 39 hingga 40 penduduk usia tidak produktif.

Pada kondisi angka beban ketergantungan yang seperti sekarang, Kota Kediri sedang menikmati bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif (usia 15-65 tahun). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk

produktif berada pada titik rendah sehingga perekonomian suatu wilayah berpotensi berkembang lebih cepat. Pada periode ini juga terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2014-2019 lebih dipengaruhi oleh

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Kediri, 2014-2021

https://kedirikota.bps.go.id

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergan-tungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014[1]	63 577	188 292	26 203	40,55
2015[1]	63 278	189 548	27 178	40,28
2016[1]	62 968	190 801	28 209	40,03
2017[1]	62 674	191 975	29 354	39,84
2018[1]	62 322	192 733	30 527	39,73
2019[1]	62 027	193 594	31 788	39,67
2020[2]	65 154	200 919	20 723	39,65
2021[3]	64 732	201 464	21 766	39,19

Sumber:[1]BPS-Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020
[2]BPS-Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September)
[3]BPS-Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

menurunnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun yang jumlah dan proporsinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020 terjadi perubahan komposisi usia penduduk dengan turunnya jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas sserta naiknya jumlah penduduk usia 0-14 tahun. Pada tahun 2021, penduduk usia 0-14 tahun kembali menurun dibandingkan tahun 2020 dan penduduk usia 65 tahun ke atas

kembali naik.

Jumlah penduduk Kota Kediri usia 15-64 tahun selama kurun waktu 2014-2021 terlihat mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari proporsi terhadap total penduduk Kota Kediri, penduduk usia 15-64 tahun mengalami penurunan persentase pada rentang tahun 2014-2019, yaitu dari 67,71 persen pada tahun 2014 menjadi 67,36 persen tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 70,06 persen dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 69,96 persen.

Di sisi lain, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas semakin meningkat dari tahun 2014-2019 baik dari sisi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 2014 jumlah dan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 26.203 jiwa atau 9,42 persen dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 31.788 jiwa atau sebesar 11,06 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 20.723 jiwa atau sebesar 7,23 persen dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 21.766 jiwa atau sebesar 7,56 persen.

https://kediri.bps.go.id

1.4 Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu pemicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun,

sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Penduduk perempuan di Kota Kediri yang berusia 15-49 tahun dengan status pernah kawin, menurut hasil Susenas tahun 2019-2021

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama di Kota Kediri, 2019-2021

Tahun	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Rata Rata Umur Perkawinan Pertama
	15-16	17-18	19-24	25-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	4,52	10,89	57,87	26,72	22,39
2020	2,58	8,77	62,93	25,71	22,20
2021	2,62	8,16	63,52	25,69	22,77

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediriskota.bps.go.id

pada tabel 1.4, rata-rata menikah pertama kali pada saat berumur 22 tahun. Hal ini bisa diartikan bahwa kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama sudah cukup tinggi.

Yang dimaksud dengan perempuan berstatus Pernah Kawin adalah perempuan yang berstatus kawin dan yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Penduduk perempuan berusia 15-49 tahun di Kota Kediri yang pernah kawin, sebagian besar menikah pertama kali pada saat berumur 19 tahun ke atas, dimana persentasenya mencapai 84,59 persen pada tahun 2019, 88,64 persen pada tahun 2020, dan 89,21 persen pada tahun 2021.

Perempuan usia-15-49 tahun di Kota Kediri yang melakukan perkawinan pertama pada usia 15-18 tahun selama tahun 2019-2021 masih fluktuatif persentasenya, yaitu berkisar antara 10,78-15,41 persen.

Perkawinan pada usia di bawah 17 tahun dan 17-18 tahun dapat mengindikasikan berbagai hal diantaranya pergaulan bebas, putus sekolah, pemahaman akan kesehatan reproduksi yang rendah, maupun pengaruh budaya. Turunnya angka perkawinan sebelum usia 17 tahun dan 17-18 tahun bisa menjadi indikasi positif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, karena dengan adanya penundaan usia menikah maka akan memperpendek masa reproduksi.

Jika diperhatikan dari seluruh penduduk perempuan Kota Kediri usia 15-49 tahun yang statusnya pernah kawin, terdapat sekitar 1,07 persen perempuan usia 15-19 tahun yang berstatus pernah kawin pada

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri, 2019-2021

Kelompok Umur	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	1,24	0,86	1,07
20-24	8,72	10,06	7,28
25-29	17,21	16,02	15,83
30-34	17,25	17,11	18,37
35-39	17,28	17,07	18,50
40-44	18,53	19,43	19,13
45-49	19,77	19,45	19,82

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

tahun 2021, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,86 persen.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan berbagai jenis/macam alat kontrasepsi/KB. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara *(reversible)* dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, faktor keterjangkauan harga, faktor cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, dan minim resiko kegagalan, faktor resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan faktor kenyamanan bagi penggunanya.

https://kedirikota.bps.go.id

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020-2021, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mencapai 59,99 persen pada tahun 2020 lalu turun menjadi 53,76 persen pada tahun 2021.

Dari tabel 1.6 berikut memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, KB suntik masih menjadi cara KB yang paling diminati oleh pengguna KB aktif. Meskipun persentase pengguna KB suntik mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 penggunaan suntikan mencapai 34,34 persen dan turun menjadi 32,69 persen pada tahun 2021.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kota Kediri, 2020-2021

Alat/Cara Kontrasepsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	10,93	11,82
MOP/Vasektomi	0,00	0,63
AKDR/IUD/Spiral	9,82	17,74
Suntikan	34,34	32,69
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	8,93	8,33
Pil	16,82	14,11
Kondom/Karet	10,43	4,94
Intravag/Tisue/Kondom Wanita	0,00	0,00
Cara Tradisional	8,73	9,73
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	59,99	53,76

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

https://kedirikota.bps.go.id

Penggunaan kondom/karet sebagai alat/cara kontrasepsi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 10,43 persen pada tahun 2020 menjadi 4,94 persen pada tahun 2021. Selain itu, penggunaan pil dan susuk KB juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengguna alat/cara KB jenis MOW/Tubektomi pada tahun 2021 meningkat jumlahnya jika dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula pengguna alat/cara KB berupa MOP/Vasektomi, AKDR/IUD/Spiral, dan cara tradisonal, mengalami peningkatan persentase bila dibanding tahun 2020.

1.6 Kepemilikan Akte Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan

Salah satu hak anak yang paling mendasar adalah hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Konvensi PBB 1989 mengenai hak anak Pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus didaftarkan segera

setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia pada 1990. Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti keabsahan anak.

Pembuatan akta kelahiran bagi anak adalah sebuah kewajiban para orang tua karena akta kelahiran selain dapat berfungsi sebagai identitas anak, administrasi kependudukan (KTP, KK) juga dapat berfungsi untuk pengurusan sekolah, pendaftaran pernikahan di KUA, mencari pekerjaan yang layak, sebagai persyaratan pembuatan paspor, dapat untuk mengurus hak ahli waris, pengurusan asuransi, tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun dan yang terpenting bagi umat muslim di Indonesia sebagai syarat untuk pengurusan pelaksanakan ibadah haji.

https://kediriKota.bps.go.id

Tabel 1.7 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Kediri, 2018-2021

Tahun	Kepemilikan Akte Kelahiran			
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya,Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	69,26	26,20	4,54	0,00
2019	91,28	4,45	4,27	0,00
2020	81,84	11,77	5,98	0,42
2021	86,61	12,23	1,16	0,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Namun sayangnya di Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga

secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini menyebabkan anak lahir tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak menyebabkan risiko eksploitasi anak semakin tinggi, anak bisa menjadi korban perdagangan manusia, mengalami kekerasan, ataupun melanggar aturan tenaga kerja dan di seluruh dunia, Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik.

Berkaitan dengan kepemilikan akte kelahiran, penduduk Kota Kediri yang berusia 0-4 tahun dan tidak memiliki akte kelahiran pada tahun 2019, persentasenya menurun dibanding tahun 2018. Hasil Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, masih ada sekitar 4,54 penduduk usia 0-4 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran. Tahun 2019, persentasenya menjadi 4,27. Sedangkan di tahun 2020, persentase balita yang tidak memiliki akte kelahiran meningkat kembali menjadi sebesar 5,98 persen. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan pelayanan pembuatan akte kelahiran setiap harinya dan juga masyarakat yang cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini cenderung membaik di tahun 2021, di mana persentase baltita yang memiliki akte kelahiran turun menjadi 1,16.

https://kediriktahbps.go.id

Tabel 1.8 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di Kota Kediri, 2018-2021

Tahun	Kepemilikan NIK		
	Ya	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	90,64	9,36	100,00
2019	94,33	5,67	100,00
2020	92,19	7,81	100,00
2021	95,55	4,45	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Turunnya persentase penduduk usia 0-4 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran pada tahun 2021 diikuti dengan penurunan persentase persentase penduduk usia 0-4 tahun yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Data pada tabel 1.8 menunjukkan persentase penduduk Kota Kediri usia 0-4 tahun yang tidak memiliki NIK. Pada tahun 2018, jumlah balita yang tidak memiliki NIK sebanyak 9,36 persen. Pada tahun 2019, jumlah balita yang tidak memiliki NIK mengalami penurunan menjadi 5,67 persen. Sedangkan pada tahun 2020 persentasenya meningkat menjadi 7,81 persen dan kembali turun menjadi 4,45 persen pada tahun 2021.

Mengingat pentingnya pencatatan hak sipil bagi anak, Pemerintah Kota Kediri perlu terus melakukan upaya dan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat, serta menginformasikan prosedur dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga hak sipil anak dapat terpenuhi.

https://kedirikota.bps.go.id

2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mampu mendukung dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan, seperti puskesmas, yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

https://kediriskota.bps.go.id

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

2.1 Angka Harapan Hidup

Indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat salah satunya adalah usia harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup dari pertama kali dilahirkan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan disuatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

https://kedirikotabps.go.id

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR)* yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Life*.

Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir (2017–2021) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 73,69 (2017) menjadi 74,04 (2021). AHH sebesar 74,04 pada tahun 2021 ini berarti bahwa penduduk Kota Kediri yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup hingga mencapai usia 74,04 tahun.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Kediri dan Jawa Timur (Tahun), 2017 – 2021

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kediri.kota.bps.go.id

Peningkatan AHH Kota Kediri selama lima tahun terakhir hanya sebesar 0,35 tahun. Lambatnya pertumbuhan angka harapan hidup ini memperlihatkan bahwa memang tidak mudah untuk menaikkan indikator ini. Dalam teorinya, angka harapan hidup akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Jika pertumbuhan ekonomi terus bertumbuh positif dan derajat kesehatan masyarakat juga meningkat, maka angka harapan hidup juga akan mengalami peningkatan.

AHH Kota Kediri selama 2017-2021 nilainya selalu berada di atas AHH Provinsi Jawa Timur, hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup penduduk Kota Kediri lebih lama dibanding rata-rata harapan hidup penduduk Jawa Timur.

2.2 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurut Hendrik L. Blumm seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit diatasi jika penyakit sudah diderita,

sehingga yang terbaik adalah melakukan pencegahan sebelum penyakit keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain memperbaiki dan mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021

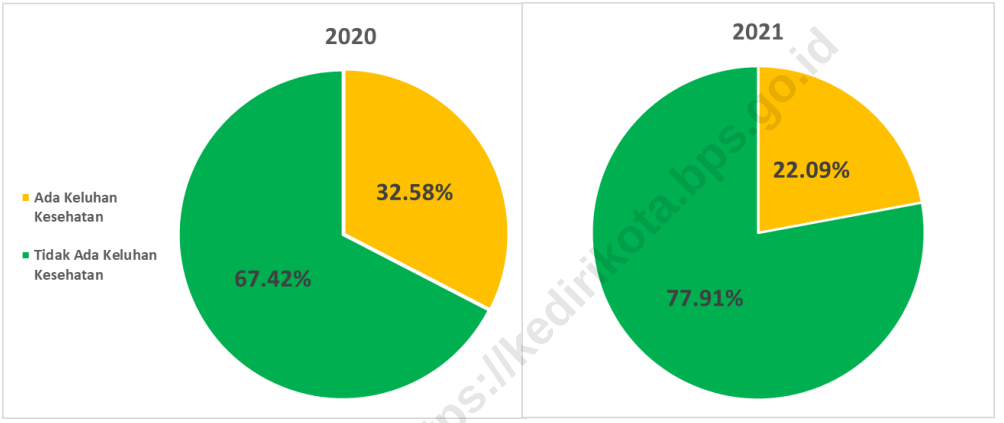

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah banyaknya keluhan kesehatan penduduk. Keluhan kesehatan menunjukkan gejala penyakit atau kondisi tubuh yang tidak sehat. Data mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah dalam menentukan program-program kesehatan. Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk Kota Kediri yang mempunyai keluhan kesehatan sebanyak 22,09 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 22 dari 100 orang di Kota Kediri mempunyai keluhan kesehatan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (Angka Kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

https://kediriskota.bps.go.id

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dan Angka Kesakitan Di Kota Kediri, 2020–2021

Jenis Kelamin	Menderita Sakit		Angka Kesakitan	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	50,95	33,64	15,90	6,96
Perempuan	46,85	35,43	15,91	8,32
Laki+Perempuan	48,81	34,59	15,90	7,64

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, sebagian ada yang tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-harinya dan ada yang menyebabkan gangguan pada kegiatan sehari-hari. Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan gangguan pada kegiatan sehari-harinya (atau biasa disebut dengan Menderita Sakit), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 48,81 persen. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 34,59 persen penduduk menderita sakit. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2021, dari 22,09 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 34,59 persen terganggu kegiatan sehari-harinya. Jika dilihat menurut jenis

kelaminnya, penduduk yang lebih banyak mengalami gangguan sakit pada tahun 2021 adalah penduduk perempuan, yaitu sebanyak 35,43 persen.

Angka Kesakitan penduduk Kota Kediri tahun 2021 mencapai 7,64 persen. Angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 6,96 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perempuan yang mencapai 8,32 persen.

Bila dibandingkan dengan angka kesakitan pada tahun 2020, terjadi penurunan angka kesakitan di tahun 2021. Angka kesakitan laki-laki di tahun 2021 turun sebanyak 8,94 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan angka kesakitan perempuan pada tahun 2021 menurun sebanyak 7,59 persen dibanding tahun 2020. Secara keseluruhan, angka kesakitan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,26 persen dibanding tahun 2020.

https://kediri-kota.bps.go.id

2.3 Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021

Berobat Jalan	Laki-Laki		Perempuan		Laki+Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ya, Berobat Jalan	41,64	26,75	44,68	30,56	43,23	28,78
Tidak Berobat Jalan	58,36	73,25	55,32	69,44	56,77	71,22

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Persentase penduduk yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik di Kota Kediri cukup

tinggi, mengingat mudahnya akses dan baiknya kualitas pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Penduduk Kota Kediri yang mengalami keluhan kesehatan, ada yang memilih untuk memeriksakan sakitnya ke sarana kesehatan atau berobat jalan, dan ada juga yang memilih untuk tidak berobat jalan. Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2020, sebanyak 43,23 persen memilih untuk berobat jalan dan sisanya sebesar 56,77 persen memilih untuk tidak berobat jalan. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 28,78 persen memilih untuk berobat jalan dan sisanya sebesar 71,22 persen memilih untuk tidak berobat jalan.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021

https://kediritkota.bps.go.id

Alasan Tidak Berobat Jalan	Laki-Laki		Perempuan		Laki+Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Biaya Berobat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tidak Ada Biaya Transpor	0,00	1,02	0,00	0,41	0,00	0,70
Tidak Ada Sarana Tranportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	1,29	0,87	0,77	0,00	1,02	0,42
Mengobati Sendiri	74,78	84,75	66,36	86,14	70,49	85,47
Tidak Ada yang Mendampingi	0,00	0,00	0,74	0,00	0,38	0,00
Merasa Tidak Perlu	23,46	12,61	32,13	11,61	27,87	12,09
Lainnya	0,48	0,75	0,00	1,84	0,23	1,32

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Mereka yang memilih untuk tidak berobat jalan pada tahun 2021, sebanyak 0,42 persen dengan alasan karena waktu tunggu pelayanan lama, 85,47 persen beralasan karena mengobati sendiri, 0,70 persen karena tidak ada biaya untuk transportasi, 12,09 persen karena merasa tidak perlu, dan 1,32 persen karena alasan lainnya termasuk khawatiran terpapar COVID-19 dan faskes tidak beroperasi karena COVID-19.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Menurut Tempat Berobat Jalan yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021

Tempat Berobat	Laki-Laki		Perempuan		Laki+Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	20,93	18,60	21,53	23,25	19,42	21,24
Praktek Dokter/ Bidan/ Klinik	50,00	69,51	48,70	56,16	49,30	61,95
Puskesmas	31,60	14,64	35,79	22,13	33,86	18,88
UKBM	0,20	0,00	1,43	1,52	0,86	0,86
Pengobatan Tradisional	1,32	0,00	0,67	0,00	0,97	0,00
Lainnya	0,00	2,08	0,00	1,25	0,00	1,61

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

https://kediri.kota.bps.go.id

Tabel 2.4 memperlihatkan bahwa penduduk Kota Kediri yang mengalami keluhan kesehatan dan memilih untuk berobat jalan selama sebulan terakhir pada tahun 2021 paling banyak mendatangi praktek dokter/bidan/klinik/praktek dokter bersama, yaitu sebanyak 61,95 persen. Sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan pilihan terbanyak kedua yang dikunjungi oleh penduduk untuk berobat jalan. Pada tahun 2021 penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit sebesar 21,24 persen; naik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 19,42 persen.

Pilihan terbanyak ketiga yang dikunjungi oleh penduduk yang berobat jalan adalah puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu), yang mencapai 18,88 persen pada tahun 2021; menurun jika dibanding dengan tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 33,86 persen.

Selain itu, penduduk Kota Kediri juga ada yang memilih untuk berobat jalan di Unit Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM); yaitu poskesdes, polindes, posyandu, balai pengobatan. Persentase penduduk yang berobat jalan di UKBM pada tahun 2021 mencapai 0,86 persen, persentase tersebut sama dengan tahun 2020 (0,86 persen). Ada juga penduduk yang memilih untuk berobat jalan ke pengobatan tradisional atau lainnya yang persentasenya mencapai 1,61 persen pada tahun 2021.

Selama sebulan terakhir, seorang penduduk yang berobat jalan dapat mendatangi lebih dari satu jenis fasilitas kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Hal ini yang menyebabkan jumlah persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobatnya lebih dari 100 persen.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Menurut Tempat Rawat Inap Setahun yang Lalu di Kota Kediri, 2020-2021

Tempat Berobat	Laki-Laki		Perempuan		Laki+Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	93,88	95,15	97,86	90,16	96,39	91,77
Praktek Dokter/ Bidan/ Klinik	3,94	3,72	1,67	9,84	2,50	7,87
Puskesmas/ Pustu	2,17	1,13	3,03	0,00	2,72	0,36
Praktek Pengobatan Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Berdasarkan data Susenas pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Kediri yang selama setahun terakhir pernah dirawat inap mencapai 4,67 persen dari total penduduk Kota Kediri.

Penduduk Kota Kediri yang pernah dirawat inap selama setahun yang lalu, sebagian besar dirawat inap di rumah sakit, yaitu sebanyak

91,77 persen. Selain di rumah sakit, ada juga penduduk yang pernah dirawat inap di tempat praktek dokter/bidan atau klinik/praktek dokter bersama dan di puskesmas/puskesmas pembantu. Rawat inap di sarana kesehatan dengan fasilitas memadai diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh penduduk.

Meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan secara nyata mampu menurunkan Angka Kematian Ibu. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih jauh dari target *MDGs* tahun 2015. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan setelah melahirkan. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu ini, Kementrian Kesehatan menetapkan Sasaran Strategis tahun 2020-2024 berupa meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 95 persen.

https://kediritakota.bps.go.id

Tabel 2.6 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak pada Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran di Kota Kediri, 2020-2021

Penolong Persalinan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	**100,00**	**100,00**
- Dokter	71,97	59,07
- Bidan	28,03	40,93
- Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	**0,00**	**0,00**
- Dukun Tradisional	0,00	0,00
- Lainnya	0,00	0,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan selama tahun 2020-2021 telah mencapai 100 persen. Tidak ada lagi kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis di Kota Kediri. Persalinan yang ditolong oleh dokter turun dari 71,97 persen pada tahun 2020 menjadi 59,07 persen di tahun 2021. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan meningkat dari 28,03 persen pada tahun 2020 menjadi 40,93 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.7 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Sebelum Dua Tahun yang Lalu Menurut Tempat Bersalin Terakhir di Kota Kediri, 2020-2021

https://kedirikota.bps.go.id

Tempat Bersalin	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Umum/Swasta/RSIA	77,30	63,54
Rumah/Klinik Bersalin	12,66	15,78
Puskesmas/Pustu	2,08	0,59
Praktek Tenaga Kesehatan	6,88	0,00
Polindes/Poskesdes	0,00	20,09
Rumah/Lainnya	1,08	0,00
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Jika diperhatikan menurut tempat melahirkan terakhirnya selama pada kurun waktu 2020-2021, jumlah wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anaknya sebelum dua tahun yang lalu yang bersalin di rumah sakit umum (pemerintah/swasta) atau rumah sakit ibu dan anak, puskesmas atau puskesmas pembantu, praktik tenaga Kesehatan, serta di rumah atau lainnya pada persalinan terakhirnya pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan persentase persalinan ibu hamil yang dilakukan di rumah/klinik bersalin dan poliklinik desa/kelurahan atau pos kesehatan

desa/kelurahan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ibu hamil yang bersalin di rumah atau klinik bersalin juga meningkat dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 15,78 persen pada tahun 2021. Demikian juga persentase ibu hamil yang bersalin di poliklinik desa/kelurahan atau pos kesehatan desa/kelurahan naik dari 0,00 persen pada tahun 2020 menjadi 20,09 persen pada tahun 2021.

https://kediriKota.bps.go.id

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

https://kediri.bps.go.id

Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam upaya pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No 20 tahun 2003 juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban "mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu, pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, dan ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi setiap warganya. Fasilitas yang dimaksud meliputi sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan sarana dan prasarana, kurikulum, sumber belajar dan daya dukung lainnya.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kota Kediri menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kualitas pelayanan pendidikan.

https://kediriKota.bps.go.id

3.1 Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS

maka semakin besar pula jumlah penduduk yang berkesempatan menikmati bangku pendidikan formal.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri (Persen), 2021

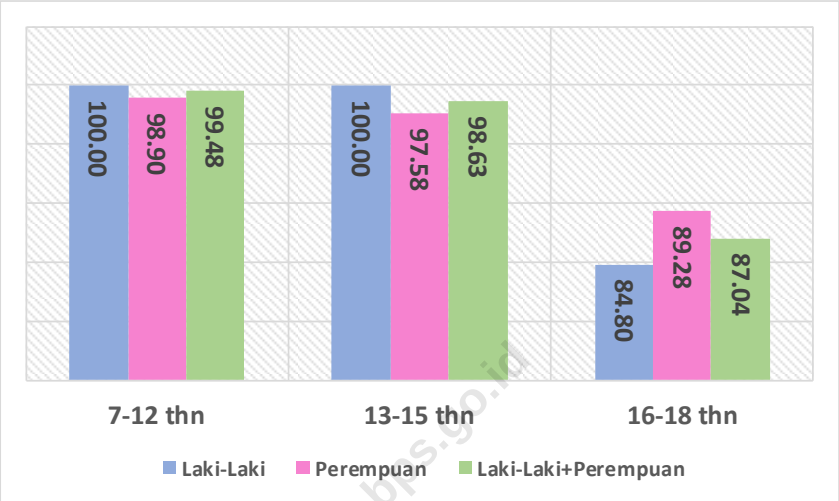

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Secara umum APS Kota Kediri di semua jenjang pendidikan tahun 2021 mencapai nilai di atas 85 persen. Penduduk Kota Kediri yang berusia 7-12 tahun yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan formal sebanyak 99,48 persen. Pada kelompok usia 13-15 tahun, 98,63 persen penduduk menikmati bangku sekolah, sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 87,04 persen penduduk berpartisipasi aktif dalam pendidikan formal, dan sisanya tidak mengikuti pendidikan sekolah dengan berbagai alasan.

Upaya peningkatan pendidikan dasar bagi penduduk Kota Kediri melalui program wajib belajar, khususnya dengan adanya program sekolah gratis untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, dan adanya program subsidi SPP bagi murid SMA/sederajat, mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah di jenjang SMP dan SMA. Upaya tersebut diperkuat dengan program prioritas pemerintah Kota Kediri di bidang pendidikan lainnya seperti program pendidikan usia dini, peningkatan

https://kedirikota.bps.go.id

mutu pendidikan dan tenaga pendidik, dan program rencana jangka panjang dengan merintis wajib belajar 12 tahun.

Secara gender, capaian APS kelompok usia 7-12 tahun laki-laki sebesar 100,00 persen sedangkan perempuan sebesar 98,90 persen. APS pada kelompok usia 13-15 tahun laki-laki sebesar 100,00 persen, lebih tinggi dari APS perempuan yang mencapai 97,58 persen. Berbeda dengan kelompok usia lainnya, pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih rendah dibanding APS perempuan, dimana APS laki-laki sebesar 84,80 persen, sementara APS perempuan mencapai 89,28 persen. Walaupun demikian, secara umum APS laki-laki maupun perempuan pada tiap jenjang usia tidak jauh berbeda yang artinya bahwa pendidikan di Kota Kediri tidak memandang gender, baik penduduk laki-laki maupun perempuan mendapat hak yang sama dalam mengakses pendidikan formal.

https://kedirikota.bps.go.id

3.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia dapat tergambarkan melalui pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat intelektual manusia berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan merupakan motor penggerak peradaban, sehingga diharapkan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka kemakmuran penduduk juga semakin meningkat.

Sekitar 32,15 persen penduduk Kota Kediri usia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA sederajat, dan sekitar 8,78 persen menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMK sederajat. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijasah tertinggi SMP sederajat berjumlah sekitar 19,52 persen, sedangkan yang memiliki ijasah tertinggi SD sederajat sekitar 13,43 persen. Penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijasah tertinggi DIV/S1/S2/S3 ada sebanyak 17,80 persen. Selain itu, masih ada penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD yaitu sebesar 5,88 persen.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Kediri, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	4,10	7,64	5,88
SD sederajat	13,15	13,71	13,43
SMP sederajat	18,43	20,59	19,52
SMA sederajat	33,52	30,80	32,15
SMK sederajat	9,76	7,82	8,78
Diploma	2,06	2,79	2,43
DIV/S1/S2/S3	18,97	16,65	17,80

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kediri.bps.go.id

Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD jumlahnya mencapai 7,64 persen; lebih banyak jika dibanding dengan penduduk laki-laki yang sebesar 4,10 persen. Penduduk perempuan yang hanya memiliki ijasah SD (13,71%) sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki (13,15%). Sementara penduduk perempuan yang lulus SMA sederajat, SMK Sederajat, DIV/S1/S2/S3 jumlahnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Sedangkan penduduk perempuan lulusan SMP sederajat dan Diploma (DI/DIII/DIII) pada tahun 2021 sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Sarana pendidikan yang tersedia di Kota Kediri terutama SD hingga jenjang SMA/SMK sudah cukup memadai dari segi jumlah dan kemudahan aksesnya. Namun persentase penduduk Kota Kediri usia 15 tahun ke atas yang pendidikan terakhirnya di bawah SLTA sederajat pada tahun 2021 masih sekitar 38,83 persen. Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi penduduknya terutama yang sudah berhenti sekolah dan belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun agar mau kembali menempuh pendidikan formal ataupun mengikuti Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C.

3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS merupakan salah satu indikator tingkat pendidikan suatu masyarakat. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin banyak jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk mengenyam bangku pendidikan formal. Harapannya semakin lama seseorang mengenyam bangku pendidikan formal, maka tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin tinggi. Namun demikian, RLS ini memiliki kelemahan, yaitu jumlah tahun bersekolah mengabaikan kasus tidak naik kelas, putus sekolah kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda.

Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Se-Eks Karesidenan Kediri (Tahun), 2020-2021

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	7,78	7,88
Trenggalek	7,55	7,56
Tulungagung	8,33	8,34
Blitar	7,39	7,50
Kediri	8,02	8,08
Nganjuk	7,64	7,78
Kota Kediri	9,93	10,15
Kota Blitar	10,11	10,35

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kedirikota.bps.go.id

RLS penduduk Kota Kediri usia 25 tahun ke atas tahun 2021 sebesar 10,15 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Kediri yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10,15 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA/sederajat. Capaian ini dapat dikatakan sudah di atas target pemerintah yaitu program wajib belajar 9

tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 9,93 tahun, RLS Kota Kediri naik sebanyak 0,22 tahun. Untuk mendorong peningkatan RLS ini, pemerintah Kota Kediri perlu melakukan terobosan di bidang pendidikan agar masyarakat; khususnya yang berusia 25 tahun ke atas; mau dan mampu menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.

Di wilayah Eks Karesidenan Kediri, RLS Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 menempati peringkat kedua. Peringkat pertama ditempati oleh Kota Blitar yang RLS-nya pada tahun 2021 mencapai 10,35 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA/sederajat. Sementara kabupaten lain di Eks Karesidenan Kediri rata-rata lama sekolahnya masih berkisar di angka 7 hingga 8 tahun. RLS Kota Kediri lebih tinggi dibanding RLS Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2021 mencapai 7,88 tahun.

https://kedirikota.bps.go.id

3.4 Angka Melek Huruf

Secara harfiah, Angka Melek Huruf adalah suatu ukuran persentase penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Latin atau lainnya.

Angka Melek Huruf (AMH) digunakan melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Kemampuan baca tulis merupakan kemampuan intelektual minimum karena sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Tabel 3.3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Se-Eks Karesidenan Kediri (Persen), 2021

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	95,15	90,06	92,56
Trenggalek	96,31	92,27	94,27
Tulungagung	97,87	94,36	96,05
Blitar	94,58	92,98	93,78
Kediri	95,87	92,67	94,28
Nganjuk	95,05	89,97	92,49
Kota Kediri	99,00	96,65	97,82
Kota Blitar	98,49	98,50	98,50

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kediritota.bps.go.id

AMH penduduk Kota Kediri yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 mencapai 97,82 persen. Hal ini berarti bahwa masih ada sekitar 2,18 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

AMH Kota Kediri tahun 2021 menduduki peringkat kedua tertinggi se-Eks Karesidenan Kediri. Peringkat pertama diduduki oleh Kota Blitar yang nilainya mencapai 98,50 persen. Sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh Kabupaten Tulungagung yang nilainya sebesar 96,05 persen. Nilai AMH Kota Kediri sudah jauh lebih tinggi jika dibanding dengan AMH Jawa Timur yang mencapai 92,56 persen.

Bila dilihat menurut gender, AMH penduduk laki-laki Kota Kediri usia 15 tahun ke atas tahun 2021 persentasenya lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Hal yang sama juga terjadi di hampir semua kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kediri. Hal ini bukan berarti bahwa ada perbedaan yang diberikan untuk penduduk laki-laki maupun perempuan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Lebih tingginya AMH laki-laki dibanding perempuan bisa disebabkan karena karakteristik budaya dimana perempuan lebih mengutamakan kehidupan domestik keluarga tanpa syarat bisa membaca dan menulis, sedangkan laki-laki

sebagai motor penggerak ekonomi keluarga harus mampu membaca dan menulis.

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru dan rasio guru/sekolah. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

https://kediriKota.bps.go.id

Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir ditampilkan pada gambar 3.2. Secara umum, rasio murid/guru di Kota Kediri selama 2017-2021 berkisar antara 14 hingga 22, yang artinya 1 guru membimbing maksimal 22 murid. Rasio murid-guru tahun 2021 pada jenjang SD dan SMP sederajat mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya, sedangkan pada jenjang SMA sederajat rasionya tetap. Kenaikan rasio murid-guru ini pada jenjang SD dan SMP disebabkan oleh persentase penurunan jumlah guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan jumlah murid pada tahun

2021.

Gambar 3.2 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2017-2021

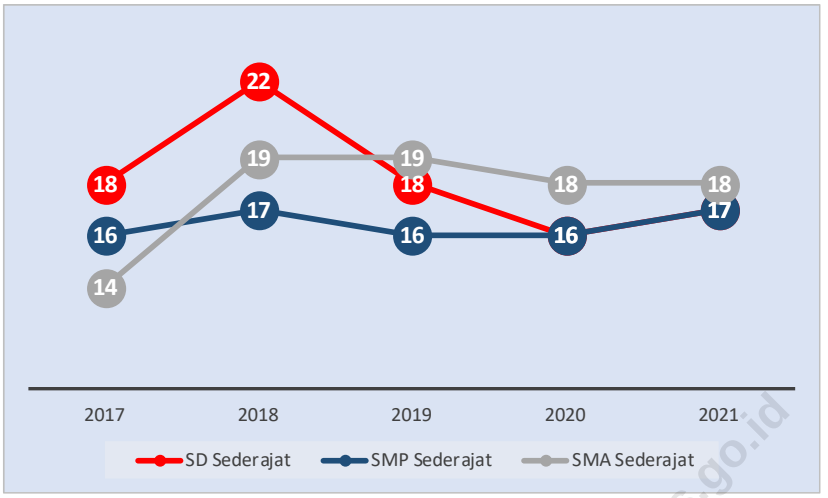

Sumber : BPS Kota Kediri

Rasio murid-guru pada jenjang SD dan SMP sederajat tahun 2021 sebanyak 17, artinya pada tahun 2021 seorang guru SD/SMP sederajat membimbing 17 murid. Sementara pada jenjang SMA sederajat, 18 orang murid dibimbing oleh satu orang guru.

https://kediri-kota.bps.go.id

Tabel 3.4 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	212	215	213	208	200
SMP/MTs	487	473	463	455	453
SMA/SMK/MA	545	640	645	673	686

Sumber : BPS Kota Kediri

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/ sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung

peserta didik. Rasio murid/sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Kediri cenderung stabil selama kurun waktu 2017-2021, kecuali jenjang SMA/SMK/MA yang mengalami kenaikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Kediri pada tahun 2021, tiap sekolah rata-rata memiliki 200 murid. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, satu sekolah diisi sekitar 453 murid. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA, satu sekolah rata-rata diisi sekitar 686 murid. Rasio Murid-Sekolah Kota Kediri selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin padat jumlah murid di sekolah yang ada di Kota Kediri.

Komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik penambahan dan revitalisasi bangunan sekolah, alat peraga pendidikan sampai dengan peningkatan kualitas tenaga pengajarnya tidak perlu diragukan lagi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah integrasi keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem. Adanya kesinambungan dan integrasi pada tiap-tiap tahapan proses penyelenggaraan pendidikan menjadi penting demi tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan.

https://kediriKota.bps.go.id

https://kediriKota.bps.go.id

4. KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat segera diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, banyaknya pekerja anak, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan Kota Kediri. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

https://kediri-kota.bps.go.id

Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi International *Labour Organization* (*ILO*). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017-2021. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengggangguran Terbuka (TPT).

https://kediriskota.bps.go.id

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 4.1
Angkatan Kerja
Kota Kediri,
2017-2021

Sumber : BPS Kota Kediri

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif di suatu wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan angka TPT-nya rendah.

Tabel 4.1 Penduduk Kota Kediri Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk 15 Tahun Ke Atas (Jiwa)	221 623	223 609	225 715	230 694	232 489
Angkatan Kerja	144 688	145 556	145 802	152 265	156 591
- Bekerja (Jiwa)	137918	140 278	139 645	142 804	146 620
- Pengangguran (Jiwa)	6 770	5 278	6 157	9 461	9 971
Bukan Angkatan Kerja	76 935	78 053	79 913	78 429	75 898
- Sekolah (Jiwa)	28 066	26 168	27 042	26 812	21 760
- Mengurus Rumah Tangga (Jiwa)	39 548	43 519	41 653	42 704	44 472
- Lainnya (Jiwa)	9 321	8 366	11 218	8 913	9 666
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,68	3,63	4,22	6,21	6,37
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	95,32	96,37	95,78	93,79	93,63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,29	65,09	64,60	66,00	67,35

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kediri.kotabps.go.id

Jumlah angkatan kerja di Kota Kediri pada tahun 2021 sebanyak 156.591 jiwa, meningkat sebanyak 4.326 jiwa dibanding tahun 2020 yang mencapai 152.265 jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 145.802 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 145.556 jiwa.

Tren TPAK Kota Kediri selama 2017-2019 cenderung menunjukkan penurunan persentase, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. TPAK Kota Kediri tahun 2021 tercatat sebesar 67,35 persen. Bila dibanding dengan tahun 2020 yang TPAK-nya mencapai 66,00 persen, terjadi peningkatan sebesar 1,35 persen. TPAK tahun 2019 lebih rendah 1,40 persen dibanding tahun 2018, dan TPAK tahun 2018 lebih tinggi 0,49 persen dari TPAK tahun 2019.

Angka TPAK tahun 2021 di atas berarti bahwa sebanyak 67,35 persen penduduk Kota Kediri yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 32,65 persen sisanya memutuskan untuk fokus bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan di luar kegiatan ekonomi.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Dari sejumlah angkatan kerja pada tahun 2021, sebanyak 146.620 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas melakukan pekerjaan atau berusaha. Bila dilihat jumlahnya, penduduk yang bekerja cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 penduduk bekerja berjumlah 140.278 jiwa, tahun 2019 sebanyak 139.645 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 142.804 jiwa. Dengan kata lain, tingkat kesempatan kerja mencapai 96,37 persen pada tahun 2018. Sedangkan dalam rentang tahun 2019 - 2021, tingkat kesempatan kerja memiliki tren yang menurun, yaitu 95,78 persen pada tahun 2019; 93,79 persen pada tahun 2020; dan 93,63 pada tahun 2021.

https://kediriko.bps.go.id

4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bisa menjadi tolok ukur kondisi dan gambaran ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat bisa tercermin dari besaran TPT. Pengangguran yang tinggi dapat menghambat tercapainya kemakmuran masyarakat.

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Kediri (Persen), 2017-2021

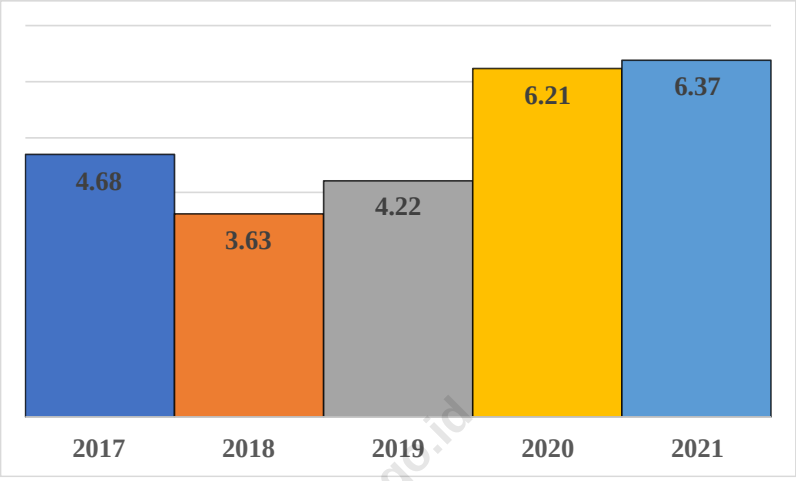

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kediritkota.bps.go.id

TPT Kota Kediri pada tahun 2017 mencapai 4,68 persen. Pada tahun 2018 TPT menurun hingga mencapai 3,63 persen. Sedangkan pada rentang tahun 2019 - 2021, TPT kembali memiliki tren naik menjadi 4,22 persen (2019), 6,21 persen (2020), dan 6,37 persen (2021).

Peningkatan TPT pada tahun 2021 tersebut masih tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak Maret 2020. Pandemi Covid-19 memaksa sebagian besar lapangan usaha menghentikan kegiatannya untuk menghambat penyebaran virus dengan penerapan *Work From Home* (*WFH*). Meskipun pada tahun 2021 perekonomian sudah mulai membaik, tetapi masih belum bisa menurunkan TPK di Kota Kediri.

https://kediriKota.bps.go.id

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Konsumsi penduduk dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor lainnya. Faktor ekonomi dipengaruhi antara lain pendapatan, tingkat suku bunga dan kekayaan. Faktor demografi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan faktor lainnya dipengaruhi oleh kebiasaan adat istiadat dan gaya hidup seseorang. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula konsumsi yang mereka keluarkan. Yang bisa diartikan juga bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga.

https://kedirikota.bps.go.id

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dibedakan berdasarkan alokasi penggunaannya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat perkotaan umumnya sudah mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan

pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kediri, 2019-2021

Kelompok Pengeluaran	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan (Rupiah)	512 133,34	561 467,00	639 163,00
Non Makanan (Rupiah)	614 527,27	688 323,00	861 306,00
Jumlah (Rupiah)	1126 660,61	1 249 790,00	1 500 469,00
Persentase Makanan	45,46	44,92	42,60
Persentase Non Makanan	54,54	55,08	57,40

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediriktahps.go.id

Gambaran konsumsi masyarakat Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 5.1. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan Kota Kediri tahun 2019 mencapai Rp. 1.126.660,00. Kemudian pada tahun 2020, rata-ratanya meningkat menjadi Rp. 1.249.790,00. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran perkapita mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.500.469,00.

Pada tahun 2019 sekitar Rp 512.133,34 atau 45,46 persen dari pengeluaran per kapita sebulan digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 614.527,27 atau 54,54 persen digunakan untuk konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2020 konsumsi makanan sebesar Rp 561.467,00 dan konsumsi non makanan sebesar Rp. 688.323,00. Sedangkan pada tahun 2021 konsumsi makanan sebesar Rp 639.163,00 dan konsumsi non makanan sebesar Rp. 861.306,00.

Jika dilihat dari proporsi konsumsi selama tahun 2019-2021, konsumsi makanan persentasenya lebih kecil dibanding dengan konsumsi non makanan. Walaupun secara proporsi mengalami penurunan, pengeluaran rata-rata per kapita untuk golongan makanan menunjukkan

peningkatan yang cukup drastis.

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Makanan di Kota Kediri (Rupiah), 2019-2021

Jenis Makanan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	53 593,11	45 026,00	47 664,00
Umbi-umbian	3 399,78	3 856,00	4 488,00
Ikan	18 773,59	17 347,00	23 163,00
Daging	24 695,09	27 185,00	33 886,00
Telur dan susu	33 968,09	41 354,00	39 094,00
Sayur-sayuran	31 777,31	39 265,00	50 716,00
Kacang-kacangan	16 494,90	15 986,00	18 353,00
Buah-buahan	27 142,31	36 091,00	37 335,00
Minyak dan lemak	13 094,18	13 105,00	15 512,00
Bahan minuman	14 544,11	15 694,00	16 420,00
Bumbu-bumbuan	7 933,91	8 145,00	11 613,00
Konsumsi lainnya	8 144,73	12 517,00	9 691,00
Makanan dan minuman jadi	210 626,49	184 943,00	273 196,00
Tembakau dan sirih	47 945,74	76 699,00	58 032,00
Jumlah	**512 133,34**	**561 467,00**	**639 163,00**

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediarikota.bps.go.id

Jika dilihat rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan berdasarkan jenisnya, pengeluaran terbesar selama tahun 2019-2021 terdapat pada jenis makanan dan minuman jadi. Rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan untuk jenis makanan dan minuman jadi di tahun 2019 sebesar Rp. 210.626,49 atau sekitar 41,13 persen dari total rata -rata pengeluaran makanan perkapita sebulan. Tahun 2020 konsumsi makanan dan minuman jadi turun menjadi Rp. 184.943,00 atau sekitar 32,94 persen dari total rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan. Sedangkan pada tahun 2021, konsumsi makanan dan minuman jadi mengalami peningkatan pesat menjadi sebesar Rp. 273.196,00 atau

sekitar 42,74 persen dari total rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan.

Rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan jenis tembakau dan sirih selama 2019-2021 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan jenis tembakau dan sirih sebesar Rp. 47.945,74 atau sekitar 9,36 persen. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp. 76.699,00 atau sekitar 13,66 persen dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 58.032,00 atau 9,08 persen.

Rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan jenis sayur-sayuran pada tahun 2021 persentasenya menempati peringkat ketiga terbesar yaitu sebanyak Rp. 50.716,00 atau sekitar 7,93 persen dari total rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan. Pengeluaran untuk konsumsi sayur-sayuran tahun 2020 mencapai Rp. 39.265,00 atau sekitar 6,99 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 31.777,31 (6,20 %). Rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan jenis sayur-sayuran selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

https://kediri.bps.go.id

Peringkat keempat rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan terbesar pada tahun 2021 adalah padi-padian, yaitu sebesar Rp. 47.664,00 atau sekitar 7,46 persen. Konsumsi padi-padian tahun 2021 sedikit lebih besar dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 45.026,00 atau sekitar 8,02 persen. Tahun 2019 konsumsi padi sebesar Rp 53.593,11 atau sekitar 10,46 persen dari total rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan.

Besarnya persentase pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi menunjukkan pola konsumsi yang mengarah pada budaya praktis. Meskipun demikian, pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini diduga berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Kota Kediri, yang menyebabkan masyarakat mengurangi pembelian makanan dan minuman jadi dan

memilih untuk memasak/membuat minuman sendiri karena dinilai lebih higienis sekaligus untuk meminimalisir resiko tertular penyakit.

Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Non Makanan di Kota Kediri (Rupiah), 2019-2021

Jenis Non Makanan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air	288 145,97	320 958,00	414 322,00
Aneka barang dan jasa	160 517,31	172 308,00	219 176,00
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	30 078,29	36 146,00	30 732,00
Barang yang tahan lama	70 354,44	75 074,00	95 634,00
Pajak pemakaian dan premi asuransi	52 520,55	59 181,00	91 795,00
Keperluan pesta dan upacara	12 910,71	24 655,00	9 646,00
Jumlah	**614 527,27**	**688 323,00**	**861 305,00**

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediri kota.bps.go.id

Rata-rata pengeluaran non makanan perkapita sebulan selama tahun 2019-2021 yang terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air nilainya sebesar Rp 288.145,97 atau sekitar 46,89 persen dari total rata-rata pengeluaran non makanan perkapita sebulan pada tahun 2019, Rp. 320.958,00 (46,63%) pada tahun 2020, dan Rp 414.322,00 (48,10%) pada tahun 2021. Rata-rata pengeluaran non makanan perkapita sebulan terbesar selanjutnya adalah pengeluaran aneka barang dan jasa, dimana pada tahun 2019 mencapai Rp. 160.517,31 (26,12%), Rp. 172.308,00 (25,03%) pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 219.176,00 (25,45%).

Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Kediri pada tahun 2021 yang terbesar adalah untuk

pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air yang nilainya mencapai 27,61 persen dari total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan. Pengeluaran makanan dan minuman jadi merupakan pengeluaran terbesar kedua pada tahun 2021, yaitu mencapai 18,21 persen dari total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan. Sedangkan pengeluaran terbesar ketiga adalah konsumsi aneka barang dan jasa yang nilainya sebesar 14,61 persen dari total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan.

https://kediriKota.bps.go.id

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan (KEPMEN No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status

https://kediritakota.bps.go.id

sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum, rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu, kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik biasanya dihuni oleh rumah tangga yang kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2019-2021, persentase rumah tangga di Kota Kediri yang rumahnya berlantaikan bukan tanah bervariasi antara 99,39 persen hingga 99,68 persen. Artinya bahwa di Kota Kediri hanya sekitar 0,5 persen saja rumah tangga yang tempat tinggalnya berlantai tanah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2019-

https://kediri.bps.go.id

2021, rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap beton, genteng, sirap, asbes atau seng di Kota Kediri sebesar 99,93 persen atau dengan kata lain hamper semua rumah tempat tinggal sudah menggunakan atap beton, seng, genteng, sirap atau asbes. Sedangkan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan dinding terluasnya menggunakan tembok dan kayu berkisar antara 99,31 persen hingga 99,99 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Kediri, 2019 - 2021

Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah	99,68	99,47	99,39
Atap beton, genteng, sirap dan asbes	100,00	100,00	99,93
Dinding terluas tembok dan kayu	99,31	99,90	99,99

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediri kota.bps.go.id

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Di Kota Kediri, penggunaan air minum cukup beragam. Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng

sebagai sumber air minum utama nilainya fluktuatif selama tahun 2019-2021. Rumah tangga di Kota Kediri yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng sebagai sumber air minum utamanya pada tahun 2019 mencapai 46,83 persen. Pada tahun 2020 persentasenya turun menjadi 41,34 persen. Lalu pada tahun 2021 persentasenya kembali naik menjadi 48,44 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan di Kota Kediri, 2019 - 2021

Indikator Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum kemasan, air isi ulang & ledeng	46,83	41,34	48,44
Tempat buang air besar sendiri	87,47	88,95	88,87
Tempat buang air besar sendiri dengan tangki septik	98,10	98,22	97,60
Sumber penerangan listrik	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

https://kediri kota.bps.go.id

Penyediaan sarana jamban juga merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Dalam usaha mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2021, rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar sendiri tercatat sebanyak 88,87 persen. Dari rumah tangga yang menggunakan jamban milik sendiri tersebut, 97,60 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri dengan tangki septik; persentase ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (98,10%) dan tahun 2020 (98,22%).

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kota Kediri yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik sepanjang tahun 2019-2021 mencapai 100 persen.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Perumahan di Kota Kediri, 2019 - 2021

Indikator Kepemilikan Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	71,58	72,74	70,72
Kontrak/sewa	11,17	10,84	11,55
Bebas Sewa/Lainnya	17,25	16,42	17,73

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik

sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kota Kediri berdasarkan hasil Susenas 2021 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 70,72 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,28 persen menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/ sewa sebesar 11,55 persen dan bebas sewa/lainnya sebesar 17,73 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan 2020. Lambatnya kenaikan persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri dimungkinkan karena harga jual rumah dan tanah di Kota Kediri sehingga banyak penduduk yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

https://kedirikota.bps.go.id

7. KEMISKINAN

Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

https://kediriKota.bps.go.id

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Saat ini, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan

komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, Nawa Cita. Terdapat empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan inilah yang dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

https://kediri.bps.go.id

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Kediri, 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2017	24,07	8,49
2018	21,90	7,68
2019	20,54	7,16
2020	22,19	7,69
2021	22,55	7,75

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri dan Jawa Timur, 2017 - 2021

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

Selama tahun 2017-2019 penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, akan tetapi pada tahun 2020 penduduk miskin sempat mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di Kota Kediri berkisar antara 20,54 ribu jiwa hingga 24,07 ribu jiwa selama tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 penduduk miskin sebesar 24.070 jiwa, kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 21.900 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri kembali menurun menjadi 20.540 jiwa. Pada tahun 2020 jumlahnya sempat mengalami peningkatan menjadi 22.910 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi 22.550 jiwa.

Persentase penduduk miskin atau biasa disebut P_0 adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. P_0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

http://kediinkota.bps.go.id

Sepanjang tahun 2021, banyak sekali bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang diberikan kepada rumah tangga di seluruh wilayah, utamanya bagi warga yang terdampak pandemi. Selain pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos rastra, program perlindungan sosial dan dana desa, serta Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang rutin digulirkan setiap tahunnya, warga Kota Kediri juga menerima berbagai bantuan selama pandemi berupa bantuan sosial tunai, kartu sembako dan beras Bulog, bantuan subsidi upah, bantuan tunai untuk UMKM, kartu Sahabat, diskon listrik, subsidi kuota belajar, dan kartu Prakerja. Selain itu, ada juga program pembebasan biaya rawat inap di rumah sakit bagi penderita Covid-19 serta bantuan sembako dan obat-obatan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Adanya bermacam bantuan yang digelontorkan pemerintah sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi warga menengah ke bawah sehingga jumlah penduduk miskin tidak meningkat secara signifikan.

https://kediricota.bps.go.id

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan antara perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan Kota Kediri mengalami peningkatan selama 2017-2021. Pada Tahun 2017 garis kemiskinan Kota Kediri sebesar Rp. 420.712,00 dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 506.936,00 pada tahun 2021.

Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 membuat peningkatan garis kemiskinan tahun 2020 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan untuk menjaga kesehatan seperti kebutuhan akan masker dan cairan antiseptik

pada masa pandemi.

Tabel 7.2 Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan di Kota Kediri dan Jawa Timur, 2017 - 2021

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (P_1)		Keparahan Kemiskinan (P_2)		Garis Kemiskinan (Rupiah)	
	Kota Kediri	Jawa Timur	Kota Kediri	Jawa Timur	Kota Kediri	Jawa Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	0,99	1,87	0,19	0,45	420 712,00	342 092,00
2018	0,87	1,94	0,18	0,50	453 807,00	373 574,00
2019	1,23	1,80	0,32	0,45	471 893,00	397 687,00
2020	0,96	1,82	0,17	0,43	493 438,00	416 001,00
2021	1,03	1,84	0,21	0,43	506 936,00	429 133,00

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

https://kedirikota.bps.go.id

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mencapai 0,99 pada periode 2017, tetapi pada tahun 2018 P_1 mengalami penurunan menjadi 0,87 dan di tahun 2019 P_1 mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin menjadi

sebesar 1,23. Pada tahun 2020 nilai P_1 kembali turun menjadi 0,96 dan tahun 2021 angka P_1 kembali naik ke 1,03. Peningkatan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang semakin meningkat berarti bahwa penduduk miskin akan semakin sulit untuk naik ke atas garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Kediri memiliki pola yang mirip dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) antar waktu. P_2 Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,01 poin pada tahun 2018, yaitu 0,19 pada tahun 2017 menjadi 0,18 pada tahun 2018. Nilai P_2 yang cenderung menurun ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin sempit. Dengan kata lain, variasi pengeluaran penduduk miskin di Kota Kediri semakin homogen. Pada tahun 2019 nilai P_2 Kota Kediri mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,32, pada tahun 2020 P_2 Kota Kediri turun menjadi 0,17 dan kembali naik menjadi 0,21 pada tahun 2021.

Persentase penduduk miskin dan nilai indeks kedalaman kemiskinan serta keparahan kemiskinan Kota Kediri selama tahun 2017-2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan garis kemiskinan Kota Kediri pada periode yang sama lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur, yang selisihnya berkisar antara 74 hingga 80 ribu rupiah.

https://kediri kotabps.go.id

7.3 Karakteristik Penduduk Miskin

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari beberapa karakteristik penduduk miskin itu sendiri. Tingkat pendidikan dan ketenagakerjaan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik penduduk miskin.

Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat

pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Tabel 7.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Kediri, 2019 - 2021

Keterangan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Tamat SD	21,33	11,51	10,27
Tamat SD dan SLTP	54,99	47,42	48,64
Tamat SLTA Ke Atas	23,68	41,07	41,09

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, 2020 dan 2021

https://kediri kota.bps.go.id

Jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Kediri tahun 2019-2021, terlihat bahwa masih ada sebesar 10,27 hingga 21,33 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang lulus SD dan SLTP sebesar 54,99 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 47,42 persen pada tahun 2020. Pada 2021, nilainya Kembali mengalami peningkatan menjadi 48,64 persen.

Beberapa ahli menyatakan pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun hal tersebut tidak mudah untuk dibuktikan secara empiris. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Kediri, 2019 - 2021

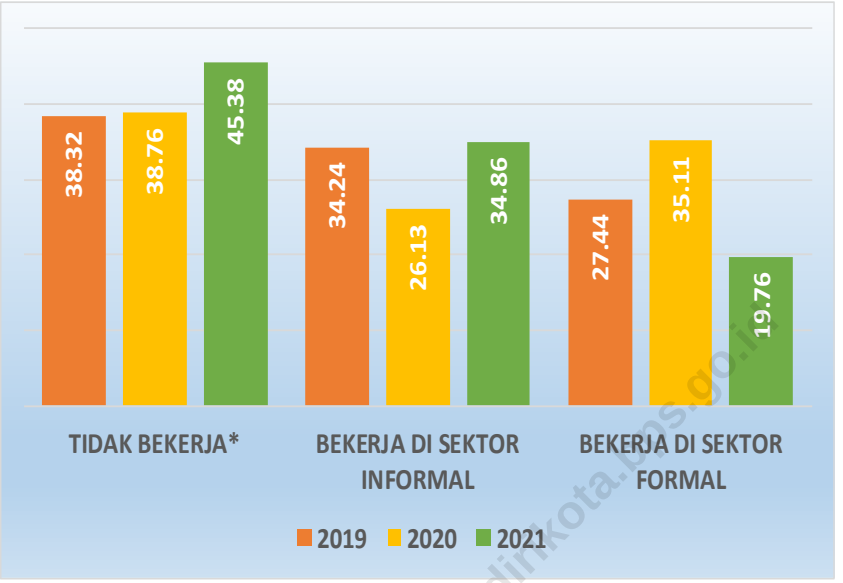

https://kediri kota.bps.go.id

**Tidak Bekerja : termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja*
Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, 2020, dan 2021

Persentase penduduk miskin Kota Kediri usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 38,32 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Kediri usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mengalami sedikit peningkatan menjadi 38,76 persen. Pada tahun 2021, persentasenya kembali meningkat menjadi 45,38 persen.

Penduduk miskin di Kota Kediri usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 34,86 persen pada tahun 2021. Terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26,13 persen. Penduduk miskin yang bekerja di sektor formal pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar

27,44 persen (2019), meningkat menjadi 35,11 persen (2020), dan mengalami penurunan yang cukup tinggi menjadi 19,76 persen (2021).

Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kota Kediri, 2019 - 2021

Keterangan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Bekerja*	38,32	38,76	45,38
Bekerja di Sektor Pertanian	5,29	3,57	5,09
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	56,39	57,67	49,53

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, 2020, dan 2021

https://kediriKota.bps.go.id

Persentase penduduk miskin Kota Kediri usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari sebesar 5,29 persen pada tahun 2019 menjadi 3,57 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian mengalami peningkatan persentase menjadi sebesar 5,09 persen.

Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian sebesar 56,39 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi 57,67 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 49,53 persen.

Penduduk miskin dalam menggunakan penghasilan yang diperolehnya cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan makanan daripada untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Hal ini terlihat dari pola konsumsi pada kategori miskin dan non miskin.

Tabel 7.5 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kota Kediri, 2019 - 2021

Keterangan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Miskin	63,74	61,57	61,46
Tidak Miskin	50,72	50,55	48,94
Miskin+Tidak Miskin	51,65	51,40	49,91

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, 2020, dan 2021

Selama tahun 2019-2021, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk kategori miskin untuk konsumsi makanan mengalami penurunan persentase, yaitu sebesar 63,74 persen (2019), menjadi 61,57 persen (2020) dan turun lagi menjadi 61,46 persen pada tahun 2021. Persentase pengeluaran perkapita penduduk kategori miskin untuk konsumsi makanan cenderung lebih tinggi 10 persen dibanding dengan penduduk tidak miskin.

https://kediri.bps.go.id

8. SOSIAL LAINNYA

8.1 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi lima kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, pengangguran, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Bekerja yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan bekerja minimal satu jam yang menghasilkan nilai ekonomis dalam seminggu terakhir baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

https://kediri-kota.bps.go.id

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Kediri, 2021

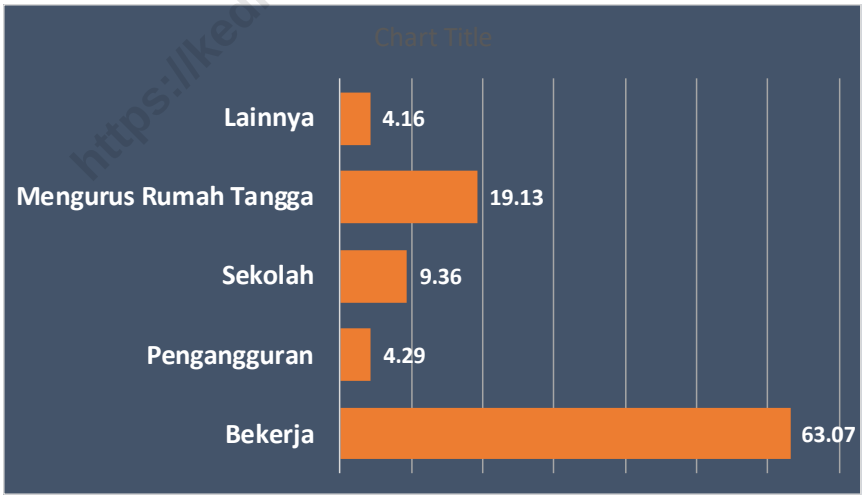

Sumber : BPS Kota Kediri

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak pertama dibanding kegiatan lainnya, yaitu sebesar 63,07 persen. Terbanyak kedua adalah penduduk yang

mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 19,13 persen. Kegiatan penduduk ketiga yang terbesar adalah bersekolah sebanyak 9,36 persen. Urutan selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 4,29 persen. Sedangkan penduduk dengan kegiatan lainnya sebanyak 4,16 persen.

8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset

Pada Susenas, terdapat pertanyaan mengenai aset yang dimiliki oleh rumah tangga, yang berupa tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es, pendingin udara (*AC*), pemanas air, komputer/laptop, emas/perhiasan minimal 10 gram, sepeda motor, mobil, dan tanah/lahan. Bila dilihat menurut jenis aset yang dimiliki oleh rumah tangga selama tahun 2019-2021, aset berupa sepeda motor dan lemari es merupakan aset yang dimiliki oleh mayoritas rumah tangga yang tinggal di Kota Kediri.

Pada tahun 2019, sekitar 88,86 persen rumah tangga yang tinggal di Kota Kediri memiliki sepeda motor. Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki sepeda motor menjadi sebanyak 87,56 persen. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki sepeda motor Kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 87,97 persen.

https://kediriskota.bps.go.id

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Kediri, 2019 - 2021

Keterangan	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)
Tabung Gas 5,5 kg/Lebih	7,43	6,73	9,01
Lemari Es/Kulkas	74,21	72,77	74,24
Pendingin Udara (*AC*)	8,19	7,93	14,78
Pemanas Air	3,53	3,10	4,00
Komputer/Laptop	31,27	34,89	45,54
Emas/perhiasan (minimal 10gr)	18,07	19,83	18,22
Sepeda motor	88,86	87,56	87,97
Mobil	16,15	16,60	20,46
Tanah/Lahan	67,54	66,80	69,31

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020 dan 2021

Rumah tangga yang memiliki aset berupa lemari es di Kota Kediri pada tahun 2019 sebanyak 74,21 persen. Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki aset lemari es menurun menjadi 72,77 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,24 persen.

Sebanyak 69,31 persen rumah tangga di Kota Kediri memiliki aset berupa tanah/lahan pada tahun 2021, meningkat jika dibanding dengan dua tahun sebelumnya yang mencapai 66,80 persen pada tahun 2020 serta 67,54 persen pada tahun 2019.

Selain sepeda motor, lemari es, dan tanah/lahan, pada tahun 2021 sekitar 31,27 persen rumah tangga di Kota Kediri juga memiliki aset berupa komputer atau laptop. Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer atau laptop meningkat menjadi 34,89 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi sebanyak 45,54 persen.

http://kedirikota.bps.go.id

Sebanyak 18,07 persen rumah tangga di Kota Kediri pada tahun 2019 memiliki aset berupa emas atau perhiasan emas yang beratnya minimal 10 gram. Jumlah ini naik menjadi 19,83 persen pada tahun 2020, namun kemudian pada tahun 2021 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 18,22 persen rumah tangga.

Rumah tangga di Kota Kediri yang memiliki aset berupa mobil pada tahun 2019 mencapai 16,15 persen. Angka ini meningkat menjadi sebanyak 16,60 persen pada tahun 2020 dan kemudian meningkat lagi menjadi 20,46 persen pada tahun 2021.

8.3 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital seperti sekarang, penguasaan/kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal yang tak kalah menarik untuk diperhatikan, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat.

Pengguna telepon seluler terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi nasional dan keterjangkauan sinyal telepon seluler/internet di Indonesia. Semakin banyaknya varian telepon seluler dengan harga yang lebih terjangkau turut mendorong masyarakat untuk memiliki telepon seluler untuk memudahkan aktivitas dan membantu berbagai sisi kehidupannya. Selain untuk kegunaan dasar, yakni telepon dan SMS, telepon seluler pun bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang memanfaatkan teknologi internet, seperti melakukan komunikasi lewat berbagai macam media sosial, mencari dan membaca berita dan informasi, berdagang, dan lain sebagainya .

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Teknologi Infomasi dan Komunikasi di Kota Kediri, 2020-2021

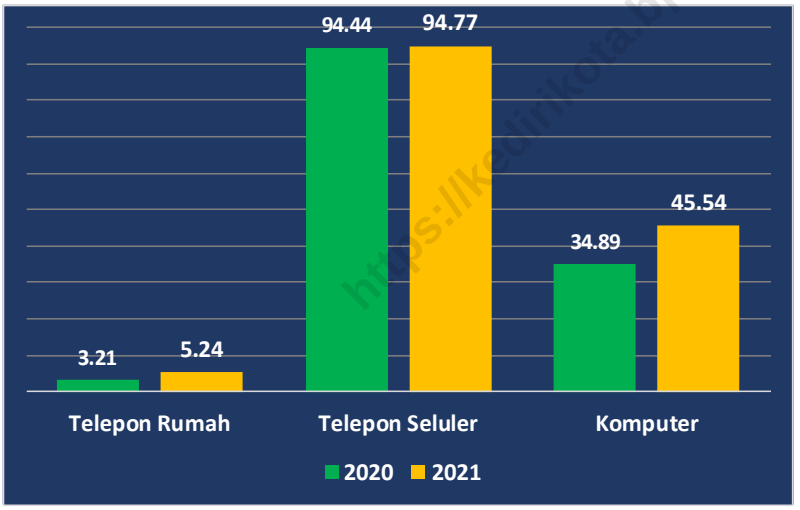

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Kepopuleran telepon seluler dibandingkan telepon rumah terlihat dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang mempunyai telepon rumah tercatat sebanyak 5,24 persen pada tahun 2021. Kondisi ini berbeda jauh dengan rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki telepon seluler. Pada tahun 2021, rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya yang menguasai atau

memiliki telepon seluler dalam tiga bulan terakhir mencapai 94,77 persen. Jumlah ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 94,44 persen.

Persentase rumah tangga yang menguasai/memiliki telepon rumah serta rumah tangga yang memiliki komputer, baik desktop maupun laptop, di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Kediri, 2021

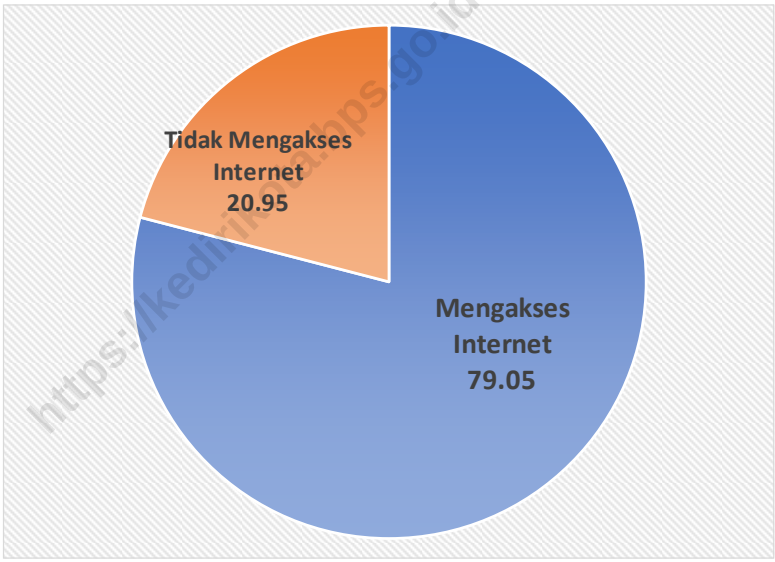

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Penduduk Kota Kediri yang berusia lima tahun ke atas yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir pada tahun 2021 sebanyak 79,05 persen. Penggunaan internet ini tidak terbatas pada penduduk yang memiliki atau menguasai komputer atau telepon selular saja, namun juga termasuk yang menggunakan komputer atau telepon selular bukan miliknya, misalnya milik saudara/temannya, komputer di tempat kerja, warung internet, atau tempat lainnya.

Gambar 8.4 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Mengakses Internet di Kota Kediri, 2021

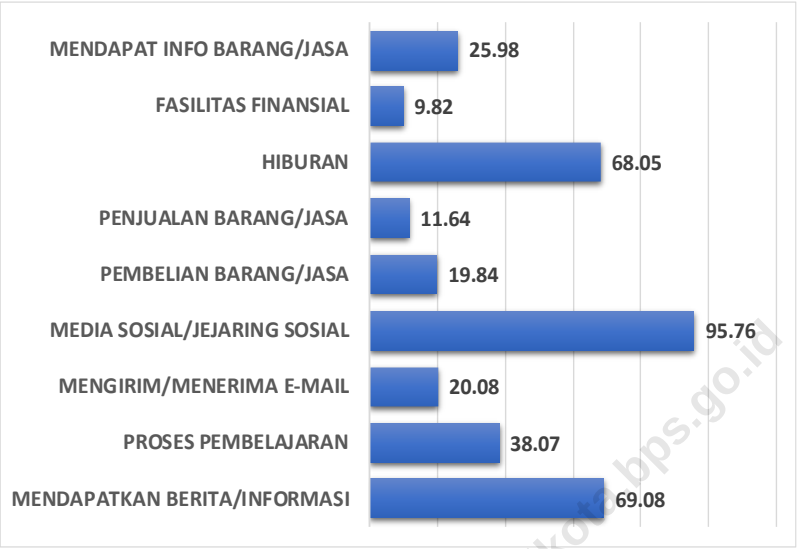

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Persentase penduduk Kota Kediri usia 5 tahun ke atas berdasarkan tujuan penggunaan internet pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 8.4. Sebagian besar penduduk Kota Kediri usia 5 tahun ke atas menggunakan internet dengan tujuan untuk mengakses media sosial atau jejaring sosial yang persentasenya mencapai 95,76 persen. Sebanyak 69,08 persen penduduk melakukan akses internet untuk mendapatkan informasi atau berita. Penduduk juga mengakses internet untuk mendapatkan hiburan, yang jumlahnya mencapai 68,05 persen. Akses internet juga digunakan untuk proses pembelajaran (38,07 persen), mendapatkan informasi mengenai barang dan jasa (25,98 persen), mengirim atau menerima e-mail (20,08 persen), membeli barang dan jasa (19,84 persen), menjual barang dan jasa (11,64 persen), serta mengakses fasilitas finansial (9,82 persen).

8.4 Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi tubuh yang tidak sehat atau sakit, dapat menghalangi seseorang untuk dapat beraktivitas dengan baik. Jatuh sakit dapat menimbulkan risiko finansial bagi siapa saja. Hal ini dikarenakan adanya sakit yang memerlukan biaya yang besar dalam usaha penyembuhannya. Biaya kesehatan di Indonesia sangat menguras keuangan rumah tangga bila harus membayar secara mandiri. Maka dari itu, untuk mengurangi risiko tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu menjamin biaya saat jatuh sakit.

Asuransi kesehatan merupakan suatu bentuk pengurangan risiko finansial bagi seseorang saat jatuh sakit. Dengan turut serta dalam asuransi kesehatan, seseorang akan memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan. Sistem asuransi kesehatan dapat mengantisipasi kejadian yang akan merugikan dari sisi keuangannya di masa yang akan datang dan tidak membuat si penderita jatuh miskin dan semakin miskin.

Pemerintah saat ini memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana salah satu langkahnya adalah mewajibkan semua warga negara terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS sendiri merupakan Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelengarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui BPJS Kesehatan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Warga negara yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat jaminan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang bersifat perorangan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, termasuk juga pelayanan obat dan bahan medis sesuai kebutuhan. Di samping itu,

https://kediriskota.bps.go.id

terdapat juga manfaat non medis yang meliputi manfaat akomodasi dan ambulan.

Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah PBI Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kelompok kedua adalah Bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta lainnya (bukan pekerja dan anggota keluarganya).

https://kediriikota.bps.go.id

Gambar 8.5 Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kota Kediri, 2021

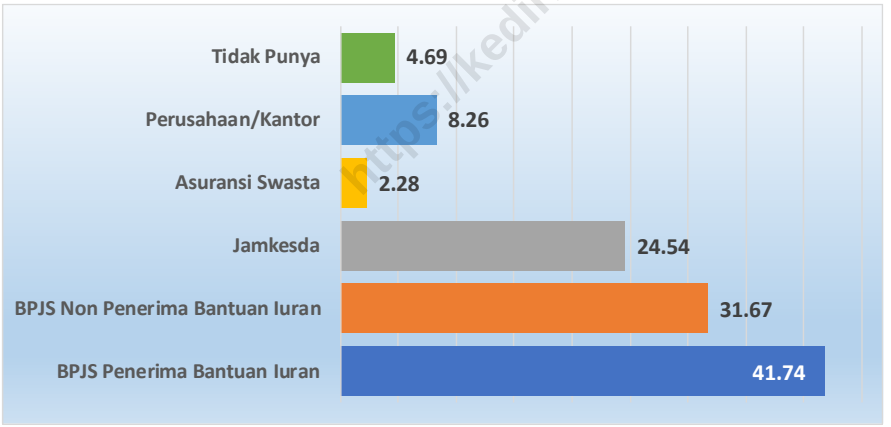

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Dari seluruh penduduk Kota Kediri pada tahun 2021, sebesar 95,31 persen penduduk telah memiliki jaminan kesehatan. Artinya masih ada sekitar 4,69 persen penduduk yang tidak memiliki/menggunakan jaminan kesehatan apapun.

Dari penduduk Kota Kediri yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2021, ada sekitar 41,74 persen yang merupakan anggota BPJS Penerima Bantuan Iuran, 31,67 persen anggota BPJS Non Penerima Bantuan Iuran, 24,54 persen penerima Jaminan Kesehatan Daerah. Ada juga penduduk yang memiliki asuransi swasta, yaitu sebanyak 2,28 persen. Sementara penduduk yang dilindungi dengan jaminan kesehatan dari perusahaan atau kantornya sebanyak 8,26 persen.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2021

Jenis Kelamin	Berobat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	48,40	82,65
Perempuan	57,36	86,31
Laki+Perempuan	53,48	85,14

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kediricota.bps.go.id

Penduduk Kota Kediri yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan selama sebulan terakhir pada tahun 2021 tercatat sebanyak 53,48 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang pernah dirawat inap selama setahun yang lalu dengan menggunakan jaminan kesehatan tercatat sebanyak 85,14 persen. Dapat dikatakan bahwa penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat di Kota Kediri sudah cukup tinggi. Penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan maupun rawat inap lebih sedikit dibanding penduduk perempuan.

Jaminan pelayanan kesehatan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung program ini agar seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan.

8.5 Aktivitas Merokok Tembakau

Sebagai salah satu indikator kesehatan masyarakat, kebiasaan merokok perlu untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan merokok berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Dalam rokok terkandung lebih dari 4000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok tetapi juga bagi orang sekitar yang sering terpapar asap rokok.

Peringatan bahaya merokok bagi kesehatan tidak henti-hentinya diserukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, tetapi masih banyak orang yang menghisap rokok. Padahal, peringatan bahaya tersebut kini semakin jelas dengan memberikan gambar akibat efek samping merokok dalam kemasan rokok. Gambar tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras karena peringatan sebelumnya kurang mengena di masyarakat terutama kalangan perokok.

https://kediricotabps.go.id

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Aktivitas Merokok Tembakau dan Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2021

Aktivitas Merokok Tembakau	Laki-Laki	Perempuan	Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Merokok Setiap Hari	38,67	0,00	19,25
Merokok Tidak Setiap Hari	2,94	0,09	1,51
Tidak Merokok	58,39	99,91	79,24
Tidak Tahu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Kota Kediri merupakan salah satu pusat industri pengolahan tembakau di Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Kota Kediri usia 5 tahun ke atas yang melakukan aktivitas merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir pada tahun 2021 mencapai 19,25 persen. Persentase ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan penduduk kabupaten kota lain di Jawa Timur yang berkisar antara 16,73-27,66 persen. Persentase penduduk Kota Kediri usia 5 tahun ke atas yang merokok setiap hari lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk Jawa Timur usia 5 tahun ke atas yang merokok setiap hari; sebanyak 22,64 persen. Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau tidak setiap hari selama sebulan terakhir sebanyak 1,51 persen.

Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak merokok selama sebulan terakhir di Kota Kediri tahun 2021 sebanyak 79,24 persen. Namun perlu diingat meskipun mayoritas penduduk Kota Kediri bukan perokok aktif, mereka tetap dapat menjadi perokok pasif. Saat seseorang merokok, sebagian besar asapnya tidak masuk ke paru-paru perokok. Namun, dilepaskan ke udara, sehingga asap dapat dihirup oleh perokok pasif. Meski tidak secara langsung merokok, perokok pasif bisa turut terkena dampak buruknya. Makin sering seseorang terpapar asap rokok, makin tinggi pula risiko gangguan kesehatan yang dialaminya.

https://kediriskota.bps.go.id

Gambar 8.6 Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap oleh Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir

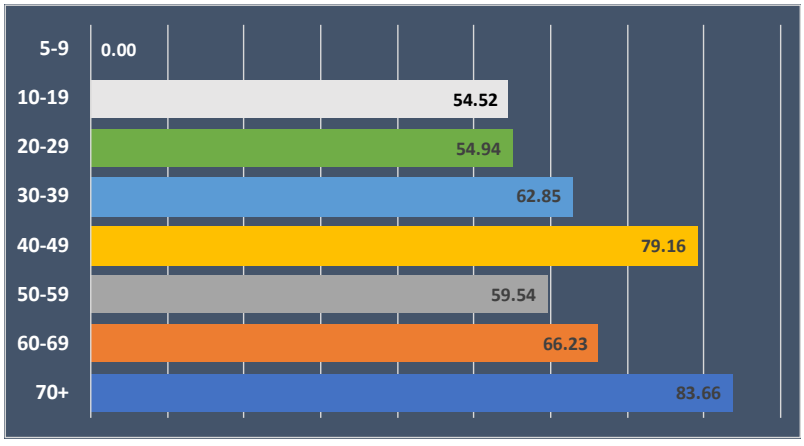

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Gambar 8.6 memperlihatkan rata-rata jumlah batang rokok per minggu yang dihisap oleh penduduk Kota Kediri yang berusia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir menurut kelompok umur. Penduduk usia 5-9 tahun di Kota Kediri pada tahun 2021 tidak ada yang merokok selama sebulan terakhir sehingga tidak ada konsumsi rokok di kelompok umur tersebut. Penduduk usia 10-19 tahun yang merokok (baik setiap hari maupun tidak) jumlahnya mencapai 4,27 persen dari total penduduk Kota Kediri usia 10-19 tahun ke atas, dengan rata-rata konsumsi rokok per minggunya sebanyak 54,52 batang rokok. Jumlah penduduk usia 20-29 tahun yang merokok mencapai 27,51 persen dengan rata-rata konsumsi rokok 54,94 batang per minggu. Rata-rata konsumsi rokok penduduk usia 30-39 tahun yang merokok (30,47%) per minggu sebanyak 62,85 batang. Rata-rata konsumsi rokok penduduk usia 40-49 tahun yang merokok (31,17%) per minggu sebanyak 79,16 batang. Penduduk usia 50-59 tahun yang merokok (22,93%) rata-rata konsumsi rokoknya sebesar 59,54 batang per minggu, sedangkan penduduk usia 60 -69 tahun yang merokok (19,70%) rata-rata konsumsinya 66,23 batang rokok per minggu, dan penduduk usia 70 tahun ke atas (11,00%) rata-rata mengkonsumsi 83,66 batang rokok per minggunya.

https://kediritkota.bps.go.id

Secara keseluruhan, dari 20,76 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir, setiap orang per minggunya rata-rata mengkonsumsi 64,83 batang rokok, atau sekitar 9,26 batang rokok per hari.

Mengingat bahaya konsumsi rokok terhadap kehidupan masyarakat, pemerintah perlu mengambil sikap tegas untuk mengendalikan bertambahnya konsumen rokok. Komitmen pemerintah, masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan mencegah kematian dini.

8.6 Akses Kredit Usaha

Akses kredit untuk usaha merupakan faktor penunjang kesejahteraan masyarakat. Akses kredit dapat menunjang ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki usaha. Diharapkan dengan fasilitas kemudahan akses kredit, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Hal ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang meminjam uang pada rentenir dengan bunga yang tinggi. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

https://kediri.bps.go.id

Gambar 8.7 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Kediri, 2021

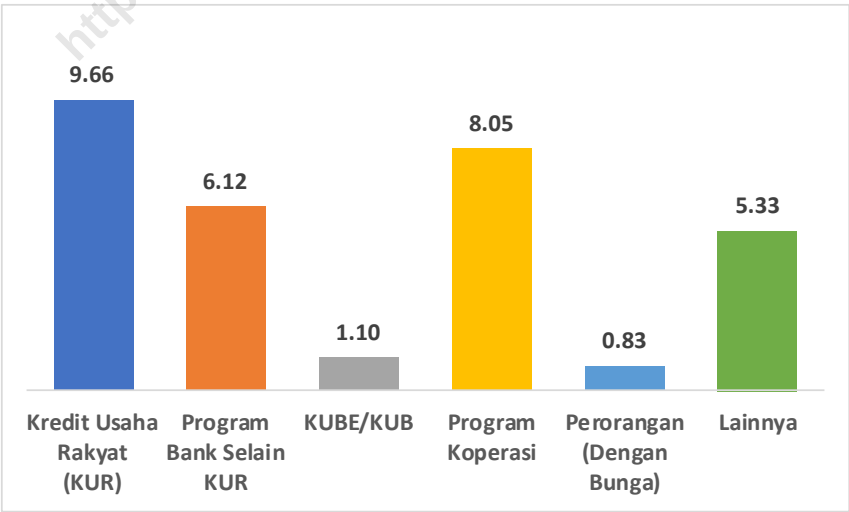

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Rumah tangga yang selama setahun terakhir ada anggota rumah tangganya yang menerima kredit usaha pada tahun 2021 berjumlah sekitar 31,09 persen dari total rumah tangga di Kota Kediri. Rumah tangga yang menerima Kredit Usaha rakyat (KUR) sebesar 9,66 persen, Program Bank selain KUR sebanyak 6,12 persen, KUBE/KUB sebanyak 1,10 persen, Program Koperasi sebanyak 8,05 persen, dan dari Perorangan (Dengan Bunga) 0,83 persen. Sedangkan rumah tangga yang menerima kredit usaha yang berasal dari kategori Lainnya sebanyak 5,33 persen. Kredit usaha yang berasal dari kategori lainnya misalnya Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Kemudahan memperoleh kredit harus selalu diupayakan Pemerintah melalui regulasi bersama instansi terkait khususnya di bidang perbankan demi memajukan ekonomi daerah. Sehingga pada akhirnya kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong laju perekonomian daerah.

https://kediriKota.bps.go.id

LAMPIRAN

https://kendricota.bps.go.id

https://kediriKota.bps.go.id

Lampiran 1.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri (Jiwa), 2019-2021

Kelompok Umur	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	23 095	23 229	20 712
5 - 9	22 220	22 348	21 577
10 - 14	21 119	21 241	22 443
15 - 19	26 630	26 783	25 219
20 - 24	26 532	26 682	23 712
25 - 29	23 572	23 708	20 721
30 - 34	22 715	22 845	20 443
35 - 39	20 931	21 053	22 494
40 - 44	21 615	21 743	21 744
45 - 49	20 125	20 247	19 303
50 - 54	18 537	18 653	18 268
55 - 59	13 843	13 930	16 225
60 - 64	9 491	9 551	13 335
65 +	16 984	17 096	21 766
Jumlah	**287 409**	**289 109**	**287 962**

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kedirikota.bps.go.id

Lampiran 2.

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri (Ribu Jiwa), 2019-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**39 699**	**40 666**	**40 879**
Trenggalek	696	731	735
Tulungagung	1 039	1 090	1 097
Blitar	1 161	1 224	1 231
Kediri	1 574	1 635	1 644
Nganjuk	1 055	1 104	1 110
Kota Kediri	287	287	288
Kota Blitar	142	149	150

https://kediricota.bps.go.id

Sumber : BPS-Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019, 2020, dan 2021

Lampiran 3.

Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**97,53**	**99,60**	**99,56**
Trenggalek	98,78	100,99	100,96
Tulungagung	95,14	100,13	100,10
Blitar	100,39	101,53	101,49
Kediri	100,78	102,03	101,99
Nganjuk	98,86	101,21	101,18
Kota Kediri	99,47	100,30	100,27
Kota Blitar	98,43	99,05	99,01

https://kediricota.bps.go.id

Sumber : BPS-Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019, 2020, dan 2021

Lampiran 4.

Angka Beban Ketergantungan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**43,71**	**43,71**	**43,71**
Trenggalek	45,33	45,48	45,53
Tulungagung	47,71	47,89	47,64
Blitar	49,06	49,22	49,14
Kediri	46,96	47,03	46,38
Nganjuk	46,45	46,59	46,27
Kota Kediri	39,75	39,65	39,19
Kota Blitar	44,62	44,63	44,19

https://kediri.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019, 2020, dan 2021

Lampiran 5.

Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**20,64**	**20,63**
Trenggalek	20,34	19,70
Tulungagung	21,20	21,39
Blitar	21,09	21,26
Kediri	21,45	21,40
Nganjuk	21,23	21,20
Kota Kediri	22,20	22,77
Kota Blitar	22,13	22,27

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 6.

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**60,92**	**61,77**
Trenggalek	56,27	64,84
Tulungagung	48,35	46,04
Blitar	57,11	61,78
Kediri	54,89	56,41
Nganjuk	65,10	63,65
Kota Kediri	59,99	53,76
Kota Blitar	55,64	57,97

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 7.

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2019-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**71,78**	**71,30**	**71,38**
Trenggalek	73,59	73,75	73,86
Tulungagung	73,95	74,08	74,16
Blitar	73,39	73,52	73,61
Kediri	72,54	72,61	72,65
Nganjuk	71,44	71,54	71,60
Kota Kediri	73,96	74,02	74,04
Kota Blitar	73,60	73,75	73,86

Sumber : BPS Kota Kediri

https://kediri-kota.bps.go.id

Lampiran 8.

Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**32,80**	**28,55**
Trenggalek	33,91	20,82
Tulungagung	31,62	30,93
Blitar	43,94	35,10
Kediri	32,23	25,72
Nganjuk	39,31	21,51
Kota Kediri	32,58	22,09
Kota Blitar	43,43	20,85

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

https://kediriKota.bps.go.id

Lampiran 9.

Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**45,89**	**52,09**
Trenggalek	51,05	36,60
Tulungagung	52,36	49,75
Blitar	41,35	33,86
Kediri	44,44	47,22
Nganjuk	53,69	41,42
Kota Kediri	48,81	34,59
Kota Blitar	37,61	47,90

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 10.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**46,00**	**39,66**
Trenggalek	48,53	39,19
Tulungagung	41,66	26,81
Blitar	42,49	23,75
Kediri	39,65	34,12
Nganjuk	49,99	36,30
Kota Kediri	43,23	28,78
Kota Blitar	49,25	26,20

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 11.

Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**5,41**	**3,40**
Trenggalek	7,72	4,34
Tulungagung	5,37	3,83
Blitar	5,12	3,67
Kediri	7,09	4,00
Nganjuk	4,79	3,09
Kota Kediri	6,75	4,67
Kota Blitar	4,93	3,88

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 12.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**99,40**	**97,76**	**74,14**
Trenggalek	99,09	96,97	77,96
Tulungagung	99,41	98,51	79,99
Blitar	99,40	99,53	70,46
Kediri	99,00	99,45	81,84
Nganjuk	99,62	99,36	83,19
Kota Kediri	99,48	98,63	87,04
Kota Blitar	99,45	97,35	91,17

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kediricota.bps.go.id

Lampiran 13.

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**4 572,73**	**429 133**
Trenggalek	84,89	358 831
Tulungagung	78,59	374 183
Blitar	112,62	335 573
Kediri	184,49	335 990
Nganjuk	125,53	446 232
Kota Kediri	22,55	506 936
Kota Blitar	11,33	481 229

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

https://kedirikota.bps.go.id

Lampiran 14.

P0, P1, dan P2 Menurut Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**11,40**	**1,84**	**0,43**
Trenggalek	12,14	1,46	0,25
Tulungagung	7,51	0,94	0,18
Blitar	9,65	0,85	0,14
Kediri	11,64	1,35	0,25
Nganjuk	11,85	1,56	0,31
Kota Kediri	7,75	1,03	0,21
Kota Blitar	7,89	1,06	0,28

https://kediri-kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Lampiran 15.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten/Kota
Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLTP	Tamat SLTA Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**27,68**	**51,86**	**20,46**
Trenggalek	23,54	63,36	13,10
Tulungagung	22,43	51,36	26,21
Blitar	20,42	63,96	15,62
Kediri	20,77	56,32	22,91
Nganjuk	21,66	53,04	25,29
Kota Kediri	10,27	48,64	41,09
Kota Blitar	12,03	51,69	36,28

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

https://kediri-kota.bps.go.id

Lampiran 16.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Tidak Bekerja*	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**40,60**	**42,14**	**17,26**
Trenggalek	40,30	48,58	11,13
Tulungagung	42,76	37,76	19,48
Blitar	41,21	39,14	19,65
Kediri	45,76	34,34	19,90
Nganjuk	47,06	34,28	18,66
Kota Kediri	45,38	34,86	19,76
Kota Blitar	44,67	24,54	30,79

https://kediricota.bps.go.id

**Tidak Bekerja : termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja*

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Lampiran 17.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Tidak Bekerja*	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**40,60**	**33,56**	**25,84**
Trenggalek	40,30	44,32	15,38
Tulungagung	42,76	28,51	28,73
Blitar	41,21	35,42	23,37
Kediri	45,76	28,51	28,73
Nganjuk	47,06	25,51	27,42
Kota Kediri	45,38	5,09	49,53
Kota Blitar	44,67	5,50	49,83

https://kediricota.bps.go.id

**Tidak Bekerja : termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja*

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Lampiran 18.

Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**65,78**	**55,96**	**57,08**
Trenggalek	65,32	57,16	57,15
Tulungagung	65,56	55,18	55,96
Blitar	61,60	55,01	55,64
Kediri	65,28	55,76	56,87
Nganjuk	68,53	59,32	60,41
Kota Kediri	61,46	48,94	49,91
Kota Blitar	59,86	49,21	50,05

https://kediricota.bps.go.id

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Lampiran 19.

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**92,51**	**83,97**
Trenggalek	50,47	88,56
Tulungagung	86,62	85,47
Blitar	93,14	99,28
Kediri	98,60	88,67
Nganjuk	98,72	93,31
Kota Kediri	100,00	87,07
Kota Blitar	92,08	93,56

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Lampiran 20.

Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Telepon Rumah	Telepon Seluler	Komputer
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	**1,89**	**87,94**	**26,20**
Trenggalek	0,51	88,60	16,27
Tulungagung	0,79	88,49	24,64
Blitar	0,31	87,52	24,42
Kediri	0,49	87,19	23,34
Nganjuk	0,38	83,17	19,94
Kota Kediri	5,24	94,77	45,54
Kota Blitar	4,11	94,47	50,80

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kediri.kota.bps.go.id

Lampiran 21.

Persentase Penduduk Usia Lima Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**13,66**	**10,44**
Trenggalek	9,78	6,63
Tulungagung	13,70	9,10
Blitar	14,01	8,78
Kediri	12,00	7,44
Nganjuk	10,87	6,78
Kota Kediri	21,85	21,35
Kota Blitar	24,39	22,33

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021

Lampiran 22.

Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Mengakses Internet	Tidak Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**79,66**	**20,34**
Trenggalek	80,33	19,67
Tulungagung	82,35	17,65
Blitar	80,93	19,07
Kediri	82,15	17,85
Nganjuk	75,23	24,77
Kota Kediri	91,94	8,06
Kota Blitar	90,34	9,66

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Lampiran 23.

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2020-2021

Kabupaten/Kota/ Prov	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**64,59**	**63,58**
Trenggalek	45,33	48,65
Tulungagung	52,61	46,73
Blitar	45,57	44,69
Kediri	55,06	53,27
Nganjuk	97,59	97,93
Kota Kediri	95,82	95,31
Kota Blitar	96,15	96,50

https://kediri kota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019 dan 2020

Lampiran 24.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Rawat Jalan	Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Jawa Timur	**35,52**	**60,85**
Trenggalek	10,34	42,46
Tulungagung	34,09	61,27
Blitar	13,63	49,82
Kediri	32,43	56,47
Nganjuk	25,40	54,31
Kota Kediri	53,48	85,14
Kota Blitar	62,59	66,97

https://kediriKota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Lampiran 25.

Rata-Rata Jumlah Batang Rokok Per Minggu yang Dihisap dan Proporsi Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur di Kota Kediri, 2021

Kelompok Umur	Jumlah Batang Rokok	Proporsi
(1)	(2)	(3)
5-9	0,00	0,00
10-19	54,52	4,27
20-29	54,94	27,51
30-39	62,85	30,47
40-49	79,16	31,17
50-59	59,54	22,93
60-69	66,23	19,70
70+	83,66	11,00
Total	**64,83**	**20,76**

https://kedirikota.bps.go.id

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Lampiran 26.

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Aktifitas Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir di Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Kediri, 2021

Kabupaten/Kota/ Prov	Ya, Setiap Hari	Ya, Tidak Setiap Hari	Tidak	Tidak Tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Timur	**22,64**	**1,67**	**75,06**	**0,64**	**100,00**
Trenggalek	24,22	1,18	74,57	0,03	**100,00**
Tulungagung	20,78	1,94	76,48	0,80	**100,00**
Blitar	22,85	2,40	74,51	0,23	**100,00**
Kediri	23,29	1,81	74,60	0,31	**100,00**
Nganjuk	23,11	0,87	75,81	0,22	**100,00**
Kota Kediri	19,25	1,51	79,24	0,00	**100,00**
Kota Blitar	18,51	1,94	79,56	0,00	**100,00**

Sumber : BPS-Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

https://kedirikota.bps.go.id

Lampiran 27.

Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Kediri, 2021

Jenis Kredit Usaha	Jumlah Penerima (Persen)
(1)	(2)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	9,66
Program Bank Selain KUR	6,12
KUBE/KUB	1,10
Program Koperasi	8,05
Perorangan (Dengan Bunga)	0,83
Lainnya	5,33
Penerima Kredit Usaha	**31,09**

https://kediri kota.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://kediriKota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA KEDIRI
Jl. Penanggungan no. 14-G Kota Kediri-Jawa Timur
Telp. (0354) 773238, Faks (0354) 773119
Homepage https://kedirikota.bps.go.id, email: bps3571@bps.go.id